



RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2024

**DINAS KESEHATAN
PEMERINTAH KOTA SAMARINDA**





SALINAN

WALI KOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA
NOMOR 47 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KOTA SAMARINDA TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 27 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Samarinda Tahun 2022, dan sesuai ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, BAPPEDA menyampaikan seluruh rancangan akhir Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Perkada;
- b. bahwa sesuai ketentuan pasal 142 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Penetapan Renja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Perkada paling lambat 1 (satu) bulan setelah Perkada tentang RKPD ditetapkan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Samarinda Tahun 2022.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6781);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri No.050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Samarinda Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 04);
11. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2016 Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2016-2021;
13. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2016-2021;
14. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 40 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Samarinda Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Samarinda.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Samarinda.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Samarinda.
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Samarinda.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

BAB II

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD)

Pasal 2

Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dijadikan sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah.

Pasal 3

- (1) Renja Perangkat Daerah Kota Samarinda Tahun 2024 berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.
- (2) Renja Perangkat Daerah Kota Samarinda Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

BAB I	Pendahuluan
BAB II	Hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu
BAB III	Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah
BAB IV	Rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah
BAB V	Penutup

Pasal 4

- (1) Renja Perangkat Daerah Kota Samarinda Tahun 2024 terdiri dari Renja Perangkat Daerah sebagai berikut:
 - a. Inspektorat Daerah Kota Samarinda;
 - b. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda;
 - c. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda;
 - d. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda;
 - e. Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda;
 - f. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda;
 - g. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Samarinda;
 - h. Dinas Kesehatan Kota Samarinda;
 - i. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda;

- j. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Samarinda;
- k. Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda;
- l. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda;
- m. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda;
- n. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda;
- o. Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda;
- p. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda;
- q. Dinas Perdagangan Kota Samarinda;
- r. Dinas Perikanan Kota Samarinda;
- s. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda;
- t. Dinas Perhubungan Kota Samarinda;
- u. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda;
- v. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda;
- w. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Samarinda;
- x. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda;
- y. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Samarinda;
- z. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda;
- aa. Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda;
- bb. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda;
- cc. Sekretariat Daerah Kota Samarinda;
- dd. Sekretariat DPRD Kota Samarinda;
- ee. Kecamatan Loa Janan Ilir;
- ff. Kecamatan Samarinda Seberang;
- gg. Kecamatan Palaran;
- hh. Kecamatan Sungai Kunjang;
- ii. Kecamatan Samarinda Kota;
- jj. Kecamatan Samarinda Ulu;
- kk. Kecamatan Samarinda Ilir;
- ll. Kecamatan Samarinda Utara;
- mm. Kecamatan Sambutan; dan
- nn. Kecamatan Sungai Pinang.

- (2) Renja Perangkat Daerah Kota Samarinda Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah sesuai dengan:
- a. Sistematika dan Substansi Penulisan Renja Perangkat Daerah; dan
 - b. Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Samarinda Tahun 2021-2026.

BAB IV PERUBAHAN

Pasal 5

- (1) Renja Perangkat Daerah Kota Samarinda Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat diubah apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
 - b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.
- (2) Perubahan Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Perubahan RKPD.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Samarinda

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 31 Juli 2023
WALI KOTA SAMARINDA,
ttd
ANDI HARUN

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 31 Juli 2023
PLH. SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,
ttd
SAM SYAIMUN

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2023 NOMOR: 438

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kota Samarinda
Kepala Bagian Hukum,


EKO SUPRAYETNO, S.Sos
Pembina Tingkat I / IV b
NIP. 19680119 198803 1 002



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

KEPUTUSAN WALI KOTA SAMARINDA

NOMOR: 100.3.3.3/1178/100.02/2024

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) DINAS
KESEHATAN KOTA SAMARINDA TAHUN 2024**

WALI KOTA SAMARINDA,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kesehatan Kota Samarinda Tahun 2024, serta efektifitas dalam pekerjaan perlu membentuk Tim Penyusun, agar dalam proses pelaksanaannya lebih terarah, terukur, dan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang ditetapkan;

c. bahwa ...

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Samarinda tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Samarinda Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan ...

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran

Klasifikasi ...

Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah;

- 10.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.115.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 11.Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Samarinda Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2014 Nomor 02);
- 12.Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Samarinda Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2015 Nomor 4);
- 13.Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren yang menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2016 Nomor 3);
- 14.Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Samarinda Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah

Kota ...

Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2021 Nomor 27, Tambahan Lembaran Daerah Kota Samarinda Nomor 11).

15. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2021-2026.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: KEPUTUSAN WALI KOTA SAMARINDA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA TAHUN 2024

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Samarinda Tahun 2024.

KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu Keputusan ini bertugas Berkoordinasi dan Menyusun Rencana Kerja Tahun 2024 di Dinas Kesehatan Kota Samarinda mulai dari persiapan penyusunan, penyusunan rancangan Renja, pelaksanaan forum, dan penetapan Renja.

KETIGA : Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Samarinda Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Ketua ...

Ketua : Kepala Dinas Kesehatan Kota Samarinda

Sekretaris: Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Samarinda

Anggota : 1. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.
2. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat.
3. Kepala Bidang Sumber Daya Manusia Kesehatan.
4. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan.
5. Kasubag. Keuangan.
6. Kasubag. Umum dan Kepegawaian.
7. Analis Perencanaan Ahli Muda.
8. Pelaksana Sub Bagian Perencanaan dan Program.

KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan melaporkan hasil kegiatan Tim serta bertanggung jawab kepada Wali Kota Samarinda melalui jenjang hierarki yang berlaku.

KELIMA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Kesehatan Kota Samarinda Tahun Anggaran 2024.

KEENAM ...

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, apabila di kemudian hari terjadi perubahan dan/atau terdapat kesalahan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda

Pada tanggal : 2 Februari 2024

a.n. WALI KOTA SAMARINDA
KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA SAMARINDA



ISMID KUSASIH



BAB I



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Pembangunan kesehatan merupakan bagian dari pembangunan nasional yang bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Pembangunan kesehatan yang dilaksanakan secara berkesinambungan telah cukup berhasil meningkatkan derajat kesehatan, namun demikian masih ada permasalahan dibidang kesehatan yaitu masih adanya potensi kematian ibu, kematian bayi, gizi buruk dan kurang pada balita serta stunting pada balita. Tingginya angka penyakit menular potensial wabah terutama demam berdarah dan penyakit akibat gaya hidup (misalnya penyakit degeneratif) juga merupakan permasalahan ganda epidemiologi yang tetap menjadi tantangan Pembangunan kesehatan. Selain itu, semakin berkembangnya pelayanan kesehatan swasta (tradisional dan modern) yang belum terkoordinir melalui sistem yang baik merupakan tantangan dalam pembangunan kesehatan di Kota Samarinda.

Dasar-dasar pembangunan kesehatan pada hakekatnya adalah nilai kebenaran dan aturan pokok sebagai landasan untuk berpikir, berpijak dan bertindak dalam penyusunan Visi, Misi dan Strategi serta sebagai petunjuk pokok pelaksanaan pembangunan kesehatan daerah. Dasar-dasar pembangunan kesehatan meliputi komitmen sikap dan tindakan agar kebenaran setiap upaya kesehatan harus berlandaskan

perikemanusiaan yang dijiwai, digerakan dan dikendalikan oleh keimanan, ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sehingga setiap tenaga kesehatan perlu mempunyai moralitas yang tinggi, berbudi luhur, memegang teguh etika profesi, harus mampu membangkitkan dan mendorong peran serta masyarakat dalam memberi pelayanan tanpa memandang perbedaan suku, golongan, agama dan status ekonomi sosialnya. Dinas Kesehatan merupakan salah satu perangkat Pemerintah Kota Samarinda yang mempunyai tugas dan fungsi membantu Walikota Samarinda di Bidang Kesehatan.

Dalam rangka merencanakan secara sistematis upaya-upaya pembangunan kesehatan yang akan dijalankan pada tahun anggaran 2024 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap PERANGKAT DAERAH perlu menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dengan telah ditetapkannya RPJMD 2021-2026 maka Dinas Kesehatan menyusun Renstra Tahun 2021-2026. Renstra Dinas Kesehatan merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif memuat program-program pembangunan kesehatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja). Maka disusunlah Rencana kerja (Renja) Perangkat Daerah Dinas Kesehatan tahun 2024. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah merupakan perumusan

Rencana Kerja perangkat Daerah yang digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah yang disusun berdasarkan Renstra Perangkat daerah dan RKPD. Perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun. Dinas Kesehatan sebagai bagian dari Organisasi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Samarinda, mempunyai kewajiban menyusun rencana kerja bidang kesehatan untuk mendukung perencanaan daerah tahunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Renja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis dikarenakan merupakan penerjemahan perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra) ke dalam perencanaan, program dan penganggaran tahunan. Sebagai dokumen rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Samarinda tahun 2024 berisi rencana program dan kegiatanyang ditetapkan sesuai dengan Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJMD) Kota Samarinda Tahun 2021 – 2026. Penyusunan Renja Dinas Kesehatan Kota Samarinda merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD. Rencana Kerja Perangkat Daerah menjadi penghubung antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan

untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. yang akan digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam rangka mencapai target (indikator).

Penyusunan Renstra Dinas Kesehatan dilaksanakan melalui pendekatan: teknokratik, politik, partisipatif, atas bawah (top-down), dan bawah-atas (bottom-up). Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Samarinda juga memuat usulan dari Pokok Pikiran, Hasil Musrenbang di tingkat Kecamatan dengan memperhatikan Sistem Kesehatan Nasional dan digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA). Program dan kegiatan yang memuat indikator, tolak ukur dan target kinerja mengacu pada Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas & Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS). Selanjutnya dipergunakan sebagai bahan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Rencana Kerja (Renja Kerja) Dinas Kesehatan Kota Samarinda Tahun 2024 berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan dan akan dijadikan pedoman dalam menyusun program dan kegiatan Dinas Kesehatan Kota Samarinda tahun 2024. Sasaran SKPD dalam RENSTRA 2021-2026 adalah :

- (1) Terjaminnya akses masyarakat pembangunan kesehatan yg berkualitas pada semua usia secara holistik dan berkelanjutan;
- (2) Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan

Program Kesehatan di Samarinda mengikuti Program Nasional dilaksanakan dengan 3 pilar utama yaitu paradigma sehat, penguatan pelayanan kesehatan dan jaminan kesehatan nasional:

- 1) Pilar paradigma sehat dilakukan dengan strategi pengarus-utamaan kesehatan dalam pembangunan, penguatan promotif preventif dan pemberdayaan masyarakat;
- 2) Penguatan pelayanan kesehatan dilakukan dengan strategi peningkatan akses pelayanan kesehatan, optimalisasi sistem rujukan dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan, menggunakan pendekatan continuum of care dan intervensi berbasis risikokesehatan;
- 3) Sementara itu jaminan kesehatan nasional dilakukan dengan strategi perluasan sasaran dan *benefit* serta kendali mutu dan kendali biaya.

Renja Dinas Kesehatan Kota Samarinda mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kota Samarinda Tahun 2021-2026, dimana kedua dokumen tersebut merupakan bentuk pelaksanaan teknis dari visi dan misi yang tertuang dalam RPJMD Kota Samarinda Tahun 2021-2026. Renja Dinas Kesehatan Kota Samarinda dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Dinas Kesehatan Kota Samarinda tahun 2024 dengan mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan Kota Samarinda, khususnya bidang Kesehatan.

1.2. Landasan Hukum

Dasar Hukum penyusunan Renja Dinas Kesehatan Kota Samarinda Tahun 2024 adalah :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820); Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6781); Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas pembantuan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri No.050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Samarinda Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 04);

11. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2016 Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2016-2021;
13. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2016-2021;
14. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 40 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Samarinda Tahun 2024;
15. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 47 Tahun 2023 tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Samarinda Tahun 2024.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Samarinda Tahun Anggaran 2024 adalah

1. Memberikan arah sekaligus sebagai pedoman bagi seluruh personil organisasi Dinas Kesehatan dalam penyelenggaraan program kerja Dinas Kesehatan dan terselenggaranya pembangunan yang efektif

dan efisien sehingga dapat mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk satu tahun mendatang (tahun 2024) melalui pelaksanaan program dan kegiatan di bidang kesehatan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran sebagaimana ditetapkan dalam Renstra secara berkesinambungan.

2. Menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan Dinas Kesehatan Kota Samarinda Tahun 2024
3. Melakukan sinkronisasi terhadap Program dalam RKPD dengan mengutamakan pengaruh isu-isu strategis pada tahun 2024.

Sedangkan tujuan penyusunan Renja Dinas Kesehatan Kota Samarinda Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Renja menjadi acuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Kota Samarinda pada tahun 2024 dengan tetap memperhatikan RKPD.
2. Renja berisikan program dan kegiatan beserta proyeksi terhadap pagu indikatif dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Kota Samarinda tahun 2024 yang mengacu pada Renstra dan RKPD.
3. Memantapkan pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) melalui pengukuran kinerja Dinas Kesehatan sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan pembangunan kesehatan daerah; serta
4. Menjadi dasar bagi penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kesehatan.
5. Rancangan Akhir Renja digunakan untuk menyusun skala prioritas dan

alat ukur dalam melaksanakan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penyusunan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Samarinda sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Capaian Renstra Dinas Kesehatan Kota Samarinda
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Kota Samarinda
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Kota Samarinda
- 2.4 Review Terhadap Rancangan awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS KESEHATAN

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Kesehatan Kota Samarinda
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KESEHATAN

BAB V PENUTUP

LAMPIRAN



BAB II



BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINKES KOTA SAMARINDA

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINKES TAHUN 2023 DAN CAPAIAN RENSTRA DINAS KESEHATAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan. Renja Dinas Kesehatan Kota Samarinda pada dasarnya menyajikan pengukuran terhadap hasil kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Samarinda selama tahun 2023 dan perkiraan target tahun 2024.

Evaluasi Renja Dinas Kesehatan Kota Samarinda pada dasarnya menyajikan pengukuran terhadap hasil kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Samarinda selama tahun 2023. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan Kota Samarinda Tahun 2023 adalah sebagaimana tersebut dalam tabel berikut :

(Tabel 1)
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2023 DAN PERKIRAAN TAHUN 2024
DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA

No	Urusan & Program dan Kegiatan		Satuan	Target Renstra 2021-2026	Realisasi Outcome Program & Output Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program & Kegiatan Tahun 2023			Target Program & Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d tahun 2024	
						Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(8/7)%	10	11	12=(11/5)%
1. PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	Jumlah Fasilitas dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	Faskes			31	29	94%	32		0%
	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Terpenuhinya Rumah Sakit Baru dengan Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	Unit			1	1	100%	1		0%
	Pembangunan Puskesmas	Terbangunnya Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas)	Unit			1	1	100%	2		0%
	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Terbangunnya Fasilitas Kesehatan Lainnya	Unit			1	1	100%	1		0%
	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Terbangunnya Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Unit			26	0	0%	26		0%

		Pengembangan Rumah Sakit	Tersedianya Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	Unit			1	1	100%	0		#DIV/0!
		Pengembangan Puskesmas	Tersedianya Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	Unit			26	26	100%	26		0%
		Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Terlaksananya Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya Sesuai Standar	Unit			5	3	60%	5		0%
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Tersedianya Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	Unit			7	7	100%	7		0%
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Tersedianya Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Puskesmas	Unit			28	0	0%	69		0%
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Tersedianya Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi	Unit			5	0	0%	3		0%

			dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya									
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Tersedianya Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan	Unit			26	0	0%	26		0%
		Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Tersedianya Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Unit			10	10	100%	4		0%
		Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Tersedianya Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Unit			10	10	100%	2		0%
		Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Unit			26	26	100%	26		0%
		Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Terlaksananya Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Pengujian dan Kalibrasi pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional <i>Maintenance Center</i>	Unit			26	0	0%	26		0%
		Pengadaan Obat, Vaksin	Tersedianya Obat dan Vaksin	Paket			26	26	100%	26		0%
		Pengadaan Bahan Habis Pakai	Tersedianya Bahan Habis Pakai	Paket			27	27	100%	27		0%

		Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Terpeliharanya Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Unit			4	4	100%	28		0%
		Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Terpeliharanya Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Unit			4	4	100%	26		0%
		Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Terpeliharanya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar	Unit			26	26.00	100%	26		0%
		Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Terlaksananya Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Paket			26	26	100%	26		0%
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Terlaksananya Pendekatan Keluarga yang Diawali Tahapan Kunjungan Keluarga	Keluarga			100	100	100%	100		0%
		Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat	Unit			1	0	0%	1		0%

			tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit									
		Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	Paket			29	0	0%	26		0%
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	Keluarga			100	0	0%	100		0%
		Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	Paket			29	0	0%	29		0%
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jiwa			893036	893,036	100%	919,827		0%
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang			14578		0%	19702		0%
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang			13701		0%	18804		0%

		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang			12995		0%	17.911		0%
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang			63354		0%	50,557		0%
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang			150200		0%	152643		0%
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang			607585		0%	860004		0%
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang			58509		0%	64,360		0%
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang			309791		0%	340770		0%
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang			32083		0%	35291		0%
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan	Orang			1300		0%	1430		0%

			Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar									
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang			15050		0%	10042		0%
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang			25494		0%	20570		0%
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Dokumen			4	4	100%	4		0%
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	Dokumen			4	4	100%	4		0%
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen			4	4	100%	2675		0%
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dokumen			4	4	100%	26		0%

		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen			4	4	100%	4		0%
		Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dokumen			4	4	100%	40		0%
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Dokumen			4	4	100%	4		0%
		Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dokumen			4	4	100%	59		0%
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Orang			1300		0%	1430		0%
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Orang			1300		0%	1430		0%
		Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	Dokumen			4	4	100%	4		0%
		Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Dokumen			4	4	100%	4		0%
		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen			4	4	100%	4		0%

		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dokumen			40000	40000	100%	4		0%
		Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah	Orang			130		0%	138		0%
		Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	Paket			1122		0%	1235		0%
		Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Dokumen			7	7	100%	7		0%
		Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan <i>Telemedicine</i> untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	Unit			1	1	100%	1		0%
		Pengelolaan Penelitian Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Penelitian Kesehatan	Dokumen			4	4	100%	4		0%

		Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Dokumen			4	4	100%	4		0%
		Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen			4	4	100%	4		0%
		Operasional Pelayanan Untuk Puskesmas Palaran	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen			4	4	100%	4		0%
		Operasional Pelayanan Untuk Puskesmas Mangkupalas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen			4	4	100%	4		0%
		Operasional Pelayanan Untuk Puskesmas Baqa	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen			4	4	100%	4		0%
		Operasional Pelayanan Untuk Puskesmas Harapan Baru	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen			4	4	100%	4		0%
		Operasional Pelayanan Untuk Puskesmas Trauma Center	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen			4	4	100%	4		0%
		Operasional Pelayanan Untuk Puskesmas Karang Asam	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen			4	4	100%	4		0%

		Operasional Pelayanan Untuk Puskesmas Loa Bakung	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen			4	4	100%	4		0%
		Operasional Pelayanan Untuk Puskesmas Juanda	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen			4	4	100%	4		0%
		Operasional Pelayanan Untuk Puskesmas Wonorejo	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen			4	4	100%	4		0%
		Operasional Pelayanan Untuk Puskesmas Pasundan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen			4	4	100%	4		0%
		Operasional Pelayanan Untuk Puskesmas Segiri	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen			4	4	100%	4		0%
		Operasional Pelayanan Untuk Puskesmas Air Putih	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen			4	4	100%	4		0%
		Operasional Pelayanan Untuk Puskesmas Remaja	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen			4	4	100%	4		0%
		Operasional Pelayanan Untuk Puskesmas Temindung	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen			4	4	100%	4		0%

		Operasional Pelayanan Untuk Puskesmas Sidomulyo	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen			4	4	100%	4		0%
		Operasional Pelayanan Untuk Puskesmas Sambutan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen			4	4	100%	4		0%
		Operasional Pelayanan Untuk Puskesmas Sungai Kapih	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen			4	4	100%	4		0%
		Operasional Pelayanan Untuk Puskesmas Makroman	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen			4	4	100%	4		0%
		Operasional Pelayanan Untuk Puskesmas Lempake	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen			4	4	100%	4		0%
		Operasional Pelayanan Untuk Puskesmas Sungai Siring	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen			4	4	100%	4		0%
		Operasional Pelayanan Untuk Puskesmas Bukuan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen			4	4	100%	4		0%
		Operasional Pelayanan Untuk Puskesmas Bantuas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen			4	4	100%	4		0%

		Operasional Pelayanan Untuk Puskesmas Bengkuring	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen			4	4	100%	4		0%
		Operasional Pelayanan Untuk Puskesmas Lok Bahu	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen			4	4	100%	4		0%
		Operasional Pelayanan Untuk Puskesmas Sempaja	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen			4	4	100%	4		0%
		Operasional Pelayanan Untuk Puskesmas Samarinda Kota	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen			4	4	100%	4		0%
		Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Dokumen			4	4	100%	4		0%
		Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	Unit			39		0%	39		0%
		Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Laporan			4	4	100%	4		0%

		Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Dokumen			4	4	100%	4		0%
		Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah <i>Public Safety Center</i> (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Unit			1		0%	1		0%
		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	orang					#DIV/0!			#DIV/0!
		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	orang					#DIV/0!			#DIV/0!
		Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	orang					#DIV/0!			#DIV/0!

	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	orang			9129		0%	10,042		0%
	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	orang			18700		0%	20,570		0%
	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	orang			588		0%	588		0%
	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Jumlah Faskes Terintegrasi dalam sistem Informasi Kesehatan	Faskes			31	29	94%	32		0%
	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Dokumen			4	4	100%	4		0%
	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Dokumen			4	4	100%	4		0%
	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi \ Kesehatan dan Jaringan Internet	Jumlah Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Unit			26	26	100%	26		0%

	yang Disediakan									
	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaen/Kota	Jumlah Izin Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Rumah Sakit			14		0%	16	0%
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C dan D	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	Unit			13		0%	13	0%
	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	Unit			14		0%	15	0%
	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	Unit			13	13	100%	13	0%
	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	Unit			10	10	100%	5	0%

	2. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan Di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Perizinan praktek yang dikeluarkan	Orang			3000		0%			#DIV/0!
		Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Dokumen			3000		0%			#DIV/0!
		Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Dokumen			3000		0%			#DIV/0!
		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Praktek Tenaga Kesehatan DI wilayah Kesehatan Kota Samarinda	Orang			776		0%			#DIV/0!
		Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dokumen			29		0%			#DIV/0!
		Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Orang			717		0%			#DIV/0!

		Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dokumen			30		0%			#DIV/0!
		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebutuhan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan yang Kompeten untuk UKP dan UKM	Orang			200		0%			#DIV/0!
		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	Orang			250		0%			#DIV/0!
	3. PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Izin yang dikeluarkan	Sertifikat			50		0%			#DIV/0!
		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Dokumen			50		0%			#DIV/0!
		Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah	Jumlah Laporan	Laporan			2		0%			#DIV/0!

	Tangga Kelas 1 tertentu Perusahaan Rumah Tangga										
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Dokumen			3		0%			#DIV/0!
	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Rumah Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	unit			150		0%			#DIV/0!
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Dokumen			150		0%			#DIV/0!

	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) Antara Lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Sarana TPM (RM/Restoran, Jasaboga, Depot Air Minum(DAM) yang diawasi, mendapat Sertifikat Penjamah Makanan dan Laik Higiene dan Sanitasi	Unit			450		0%			#DIV/0!
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Dokumen			450		0%			#DIV/0!
	Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Jumlah tempat Makanan Jajanan (PKL/Pasar Ramadhan) dan Sentra Makanan Jajanan yang diawasi dan mendapat Sticker Pembinaan serta mendapat Sertifikat Penjamah Makanan	Unit			100		0%			#DIV/0!
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Dokumen			100		0%			#DIV/0!

	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Jumlah PIRT yang diperiksa dan Diawasi	Unit			150		0%			#DIV/0!
	Pemeriksaan <i>Post Market</i> pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan <i>Post Market</i> dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	Unit			150		0%			#DIV/0!
4. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan	Laporan			1		0%			#DIV/0!
	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Dokumen			1		0%			#DIV/0!
	Pelaksanaan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan Hidup Bersih dan sehat	Kegiatan			19		0%			#DIV/0!
	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan Hidup Bersih dan sehat	Kegiatan			19		0%			#DIV/0!

	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Sersih dan Sehat	Keluarga			100		0%			#DIV/0!
	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bimbingan Teknis, Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Sehat	Bimtek			2		0%			#DIV/0!
	Bimbingan Teknis Dan Supervisi Pengembangan Dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dokumen			2		0%			#DIV/0!
5. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akip	Nilai			7,3		0%			#DIV/0!
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen			7		0%			#DIV/0!
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen			1		0%			#DIV/0!

	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen			1		0%			#DIV/0!
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen			1		0%			#DIV/0!
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen			1		0%			#DIV/0!
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan			1		0%			#DIV/0!
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan			4		0%			#DIV/0!
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen			888	888	100%			#DIV/0!

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan			5	5	100%			#DIV/0!
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang Diklat	orang			200	0	0%			#DIV/0!
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bimtek	orang			0	0	#DIV/0!			#DIV/0!
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai	Orang			1945		0%			#DIV/0!
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit			10		0%			#DIV/0!
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket			1945	0	0%			#DIV/0!
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen				0	#DIV/0!			#DIV/0!
	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen				0	#DIV/0!			#DIV/0!
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan	Dokumen			1075		0%			#DIV/0!

		Penilaian Kinerja Pegawai								
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan	Laporan			8		0%		#DIV/0!
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket			2		0%		#DIV/0!
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket			2		0%		#DIV/0!
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket			20		0%		#DIV/0!
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket			20		0%		#DIV/0!
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket			10		0%		#DIV/0!
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen			2		0%		#DIV/0!
	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan			900		0%		#DIV/0!
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat	Laporan			37		0%		#DIV/0!

		Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan rencana kebutuhan barang	laporan			158		0%			#DIV/0!
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit			5	2	40%			#DIV/0!
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit			3	0	0%			#DIV/0!
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit			50	50	100%			#DIV/0!
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit			50	50	100%			#DIV/0!

	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit			1	0	0%			#DIV/0!
	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Unit			1	0	0%			#DIV/0!
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit			3	0	0%			#DIV/0!
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit			50	0	0%			#DIV/0!
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit			50	0	0%			#DIV/0!
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan			2	2	100%			#DIV/0!
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan			7	7	100%			#DIV/0!
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Pemeliharaan	Laporan			5	5	100%			#DIV/0!

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit			345	345	100%	-	-	#DIV/0!
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit			345	345	100%			#DIV/0!
	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit			50	50	100%			#DIV/0!
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit			150	150	100%			#DIV/0!
	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit					#DIV/0!			#DIV/0!
	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Unit			6		0%			#DIV/0!
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	Unit			30		0%			#DIV/0!
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit			30		0%			#DIV/0!
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit			30		0%			#DIV/0!

	Peningkatan Pelayanan BLUD	Terlaksananya Operasional BLUD Rumah Sakit & Puskesmas	Bulan								
					12	12	100%				#DIV/0!
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja		1	1	100%				#DIV/0!
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD RSUD IA. Moeis	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja		1	1	100%				#DIV/0!
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD air Putih	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja		1	1	100%				#DIV/0!
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Bengkuring	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja		1	1	100%				#DIV/0!
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Harapan Baru	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja		1	1	100%				#DIV/0!
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Juanda	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja		1	1	100%				#DIV/0!
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Kampung Baqa	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja		1	1	100%				#DIV/0!
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Lempake	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja		1	1	100%				#DIV/0!

	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Palaran	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja			1	1	100%			#DIV/0!
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Sei. Siring	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja			1	1	100%			#DIV/0!
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Sidomulyo	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja			1	1	100%			#DIV/0!
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Wonorejo	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja			1	1	100%			#DIV/0!
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Trauma Center	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja			1	1	100%			#DIV/0!

Berdasarkan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2023 maupun perkiraan capaian tahun 2024, dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kesehatan Kota Samarinda sebagai berikut :

1. Sebagian besar usulan program/kegiatan bersumber dari APBD yang diusulkan pada tahun 2023 hingga 2024 tidak diinventarisasi karena defisit Anggaran Daerah.
2. Tuntutan pencapaian indikator Kinerja berbasis Standar Pelayanan Minimal tidak seiring dengan peningkatan pembiayaan, sehingga pencapaian Pembangunan Kesehatan Kota Samarinda perlu dilakukan bertahap berdasarkan penyusunan rencana strategi yang tajam;
3. Perencanaan program/kegiatan oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda masih berorientasi terhadap *output* bukan *outcome*, sehingga pelaksanaan evaluasi belum maksimal.
4. Masih ada kesenjangan akan jangkauan dan kualitas pelayanan.
5. Perilaku masyarakat dan lingkungan yang kondusif untuk hidup sehat belum menunjukkan peningkatan sesuai dengan yang diharapkan
6. Perkembangan daerah menuju perkotaan baru, pengaruh budaya dari luar dalam penggunaan IPTEK tanpa batas, peningkatan jumlah penduduk dan masih terdapat kawasan kumuh sehingga berpotensi sebagai ancaman bagi masyarakat kedepan akan meningkatnya penyakit menular seperti TB, DBD, malaria dan

penyakit yang berdampak sosial besar seperti HIV-AIDS, flu burung, penyalahgunaan NAPZA (narkotika) dan Covid-19.

7. Sumber daya kesehatan berupa tenaga kesehatan, anggaran dan sarana prasarana belum mencukupi sesuai standar .

Berdasarkan matrikulasi kewenangan daerah di bidang kesehatan dan arahan Perwali No 09 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Samarinda Strategi Pembangunan Kesehatan di Kota Samarinda yang tertuang dalam Renstra tahun 2022-2026

Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kesehatan di Kota Samarinda adalah sebagai berikut :

Tujuan **Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kota Samarinda**

Sasaran 1. Terjaminnya akses masyarakat pembangunan kesehatan yang berkualitas pada semua usia secara holistik dan berkelanjutan
2. Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*outcome*), manfaat (*benefit*) dan dampak (*impact*). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja

ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

Indikator kinerja dalam Renstra OPD merupakan tolok ukur kinerja dalam menentukan capaian jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah (Permendagri 3/2006). Indikator kinerja disusun sebagai alat Pemerintah dan Pemerintahan Daerah untuk menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat secara merata dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib sesuai PP 65/2005, Permendagri 79/2007 dan Permenkes 75/2014.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal berjumlah 12 Indikator Kinerja, sebagai berikut :

1. Pelayanan kesehatan ibu hamil
2. Pelayanan kesehatan ibu bersalin
3. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir
4. Pelayanan kesehatan balita
5. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar
6. Pelayanan kesehatan pada usia produktif
7. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut
8. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi
9. Pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus
10. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat
11. Pelayanan kesehatan orang dengan TB
12. Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV

Tabel 2
Target dan capaian indikator dalam Standar Pelayanan Minimal
(SPM) Bidang Kesehatan Tahun 2022 – 2026.

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK (PP- 4/201 9)	Target Renstra SKPD Tahun					Realisasi Capaian Tahun		Proyeksi (tahun)			Catatan Analisa
				2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2022	2023	2024	
SPM Kesehatan (Permenkes : No. 4 Tahun 2019)														
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	100	100	100	100	100	100	100	87,10	87,79	100	100	100	
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersaling	100	100	100	100	100	100	100	93,64	92,47	100	100	100	
3	Pelayanan kesehatan bagi bayi baru lahir	100	100	100	100	100	100	100	90,05	91,19	100	100	100	
4	Pelayanan Kesehatan Balita	100	100	100	100	100	100	100	85,59	85,23	100	100	100	
5	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	100	100	100	100	100	100	100	96,34	75,06	100	100	100	
6	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	100	100	100	100	100	100	100	61,42	80,91	100	100	100	
7	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	100	100	100	100	100	100	100	70,33	76,71	100	100	100	
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	100	100	100	100	100	100	100	54,48	98,99	100	100	100	
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	100	100	100	100	100	100	100	98,92	97,96	100	100	100	
10	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa	100	100	100	100	100	100	100	99,57	100,00	100	100	100	
11	Pelayanan Kesehatan Orang dengan TB	100	100	100	100	100	100	100	65,48	100,00	100	100	100	
12	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV	100	100	100	100	100	100	100	100,00	100,00	100	100	100	

2.3 ISU – ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH.

A. Permasalahan dan Hambatan

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kota Samarinda adalah sebagai berikut :

A.1. Pengelolaan Upaya Kesehatan Perorangan.

a. Faktor Pendorong

- Kecenderungan meningkatnya ratio pembiayaan kesehatan di APBD Kota Samarinda
- Implementasi JKN (Jaminan Kesehatan Nasional)
- Akreditasi Puskesmas
- Akreditasi RSUD

b. Faktor Penghambat

- Jumlah dan Distribusi SDM Kesehatan belum merata di seluruh wilayah
- Kompetensi SDM Kesehatan di fasyankes primer perlu lebih dikembangkan sesuai perkembangan keilmuan profesi

A.2. Pengelolaan Upaya Kesehatan Masyarakat

a. Faktor Pendorong

- Implementasi Program Keperawatan Kesehatan oleh Kementerian Kesehatan
- Stake Holder sudah terlibat aktif didalam mengelola Kebijakan publik berwawasan kesehatan

b. Faktor Penghambat

- Dukungan Dunia Usaha & Ormas yang perlu lebih ditingkatkan

A.3. Penerbitan Izin Fasilitas pelayanan kesehatan & Surat Izin Praktek / Kerja Tenaga Kesehatan

a. Faktor Pendorong

- Implementasi UU Kesehatan No 36 Tahun 2014
- Meningkatkan peran Organisasi Profesi melakukan pembinaan terhadap anggotanya

b. Faktor Penghambat

- Akses terhadap Sistem registrasi pendaftaran belum berkembang
- Peran Puskesmas sebagai penanggung jawab wilayah kesehatan harus lebih ditingkatkan

A.4. Perencanaan & Pengembangan SDM Kesehatan

a. Faktor Pendorong

- Meningkatnya kualitas dan kuantitas Fasilitas pendidikan kesehatan di Kota Samarinda
- Fasilitasi usulan ketenagaaan melalui formasi kepegawaian telah menggunakan WISN (Workload Indicator Staff Needs)
- Meningkatnya migrasi tenaga kesehatan dari luar Kota Samarinda

b. Faktor Penghambat

- Distribusi tenaga medis dan para medis belum merata
- Fasilitas pengembangan kompetensi pendidikan berkelanjutan masih kurang

A.5. Penerbitan izin produksi makanan dan minuman pada industri Rumah Tangga

a. Faktor Pendorong

- Implementasi Sistem Registrasi online
- Peran Balai Besar BPOM dalam membina industri Rumah Tangga
- Peran Puskesmas dalam upaya pencegahan penderita terkait makanan dan minuman

b. Faktor Penghambat

- Dinas Kesehatan sudah memiliki UPT Laboratorium daerah namun belum berjalan dengan maksimal

A.6 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN

a. Faktor Pendorong

- Peran Stakeholder terkait kesehatan meningkat
- Kesadaran masyarakat ber PHBS meningkat seiring meningkatnya IPM Kota Samarinda

b. Faktor Penghambat

- Peran serta masyarakat dalam wadah UKBM (Upaya Kesehatan berbasis masyarakat) masih rendah

B. Dampak Terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah

Arah Kebijakan Pembangunan Bidang Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Samarinda merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Samarinda yang dijadikan sebagai substansi dan rujukan utama penyusunan RPJMD. Visi pembangunan memiliki arti penting untuk menyatukan cita-cita bersama seluruh komponen daerah tentang apa yang sudah direncanakan dan apa yang menjadi prioritas dalam pembangunan berdasarkan permasalahan dan isu-isu strategis daerah. Oleh karena itu, diperlukan kebersamaan yang bersifat mutualisme oleh penyelenggara pemerintahan daerah dan segenap komponen dunia usaha serta masyarakat untuk mencapainya.

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, tantangan dan peluang serta keselarasan dengan hasil analisis permasalahan serta isu strategis Kota Samarinda maka untuk memajukan Kota Samarinda kedepan ditetapkan arahan visi Kota Samarinda sebagai berikut:

Sesuai dengan Visi Kota Samarinda yang tercantum dalam RPJMD Kota Samarinda Tahun 2022 - 2026, yaitu :

“TERWUJUDNYA SAMARINDA SEBAGAI KOTA PUSAT PERADABAN”

Misi merupakan upaya umum bagaimana mewujudkan sebuah Visi dengan cara- cara yang efektif dan efisien. Misi menjadi alasan utama mengapa suatu organisasi harus berdiri dengan membawa komitmen dan konsistensi kinerja yang terus dijaga oleh segenap stakeholders pembangunan. Berdasarkan arahan visi di atas, maka ditetapkan arahan misi pembangunan daerah jangka menengah sebagai berikut:

- **Misi Pertama : SUMBER DAYA MANUSIA**
 - a) Mewujudkan Warga kota yang religius, unggul dan berbudaya
 - b) Mewujudkan masyarakat madani (civil society) ditopang dengan sumberdaya manusia unggul, sehat jasman dan rohani dalam kehidupan yang harmonis, egaliter serta relasi yang seimbang antar tiga pilar (masyarakat, negara dan swasta)
- **Misi Kedua : EKONOMI KOTA**
 - a) Mewujudkan perekonomian kota yang maju, mandiri, berkerakyatan dan berkeadilan
 - b) Mewujudkan kemandirian ekonomi daerah dan masyarakat yang ditandai dengan peningkatan PAD, berkurangnya angka pengangguran, berkembangnya sector riil di luar pertambangan, munculnya ekonomi kreatif, start up dan market place di era revolusi industry 4.0
- **Misi Ketiga : PEMERINTAHAN**
 - a) Mewujudkan Pemerintahan yang profesional, transparan, akuntabel dan bebas korupsi dengan memberi ruang bagi partisipasi masyarakat
 - b) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel dan bebas korupsi, dengan memberikan ruang yang luas bagi partisipasi masyarakat dalam proses perumusan dan pengawasan kebijakan

- **Misi Keempat : INFRASTRUKTUR**
 - a) **Mewujudkan Infrastruktur yang mantap dan modern**
 - b) **Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang mantap, modern, nyaman dan ramah lingkungan dalam konsep SMART CITY yang dicirikan pemanfaatan teknologi informasi**
- **Misi Kelima : LINGKUNGAN KOTA**
 - a) **Mewujudkan kota dengan lingkungan yang aman, nyaman, harmoni dan lestari**
 - b) **Mewujudkan masyarakat religius, mengedepankan nilai-nilai agama dan memegang teguh tradisi dan adat istiadat sebagai warisan leluhur dan identitas bangsa**

C. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan yang diatur didalam UU No 23 Tahun 2014 meliputi Pengelolaan UKP (Upaya Kesehatan Perorangan), Pengelolaan UKM (Upaya Kesehatan Masyarakat), Penerbitan izin Rumah Sakit tipe C dan D dan Fasyankes di daerah, Penerbitan Izin Praktek & Izin Kerja Tenaga Kesehatan di daerah, Perencanaan dan Pengembangan SDM Kesehatan, Penerbitan izin Farmasi, Penerbitan izin UMOT (Usaha Mikro Obat Tradisional), Penerbitan Izin Makanan & Minuman, Pengawasan *Post-Market* Makanan & Minuman, Pemberdayaan Masyarakat bidang Kesehatan.

Secara teknis, Dinas Kesehatan mengikuti Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Walikota Samarinda No. 24 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Samarinda. Perwali ini menjelaskan secara rinci Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan, yang dibawahkan kepada 4 Bidang Pelaksana, 1 Sekretariat Dinas, 28 UPTD dan 1 RS Daerah

terdiri dari 26 Puskesmas, 1 UPT Instalasi Farmasi, 1 UPT Laboratorium Kesehatan Daerah dan 1 RSUD I.A. Moeis. Berikut tantangan dan peluang dalam pelayanan kesehatan :

1. Pengelolaan Upaya Kesehatan Perorangan.

a. Tantangan

- Jumlah dan Distribusi SDM Kesehatan belum merata di seluruh wilayah
- Kompetensi SDM Kesehatan di fasyankes primer perlu lebih dikembangkan sesuai perkembangan keilmuan profesi

b. Peluang

- Kecenderungan meningkatnya ratio pembiayaan kesehatan di APBD Kota Samarinda
- Implementasi JKN (Jaminan Kesehatan Nasional)
- Akreditasi Puskesmas
- Akreditasi RSUD

2. Pengelolaan Upaya Kesehatan Masyarakat

a. Tantangan

- Kurangnya dukungan Dunia Usaha & Ormas

b. Peluang

- Implementasi Program Keperawatan Kesehatan oleh Kementerian Kesehatan
- Stake Holder sudah terlibat aktif didalam mengelola Kebijakan publik berwawasan kesehatan

3. Penerbitan Izin Fasilitas pelayanan kesehatan & Surat Izin Praktek / Kerja Tenaga Kesehatan

a. Tantangan

- Akses terhadap Sistem registrasi pendaftaran belum berkembang
- Peran Puskesmas sebagai penanggung jawab wilayah kesehatan harus lebih ditingkatkan

- b. Peluang
 - Implementasi UU Kesehatan No 36 Tahun 2014
 - Meningkatkan peran Organisasi Profesi melakukan pembinaan terhadap anggotanya
4. Perencanaan & Pengembangan SDM Kesehatan
- a. Tantangan
 - Distribusi tenaga medis dan para medis belum merata
 - Fasilitas pengembangan kompetensi pendidikan berkelanjutan masih kurang
 - b. Peluang
 - Meningkatnya kualitas dan kuantitas Fasilitas pendidikan kesehatan di Kota Samarinda
 - Fasilitasi usulan ketenagaan melalui formasi kepegawaian telah menggunakan WISN (Workload Indicator Staff Needs)
 - Meningkatnya migrasi tenaga kesehatan dari luar Kota Samarinda
5. Penerbitan izin produksi makanan dan minuman pada industri Rumah Tangga
- a. Tantangan
 - Dinas Kesehatan baru memiliki UPT Laboratorium daerah yang masih memiliki alat yang terbatas
 - b. Peluang
 - Tersedianya UPT Laboratorium Daerah dengan alat yang lengkap
 - Implementasi Sistem Registrasi online
 - Peran Balai Besar BPOM dan UPT Labkes dalam membina industri Rumah Tangga
 - Peran Puskesmas dalam upaya pencegahan penderita terkait makanan dan minuman.

6. Pemberdayaan Masyarakat bidang Kesehatan
 - a. Tantangan
 - Peran serta masyarakat dalam wadah UKBM (Upaya Kesehatan berbasis masyarakat) masih rendah
 - b. Peluang
 - Peran Stakeholder terkait kesehatan meningkat
 - Kesadaran masyarakat ber PHBS meningkat seiring meningkatnya IPM Kota Samarinda.

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra Dinas Kesehatan dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Dinas Kesehatan, dengan arahan kepala daerah terkait prioritas program/kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk setiap Dinas Kesehatan berdasarkan rancangan awal RKPD.

Berdasarkan beberapa pertimbangan yang ada dari tingkat Pusat, Provinsi maupun Daerah, RKPD Dinas Kesehatan lebih mengarah kepada prioritas pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dan mengacu pada SPM Bidang Kesehatan No. 4 Tahun 2019.

Review terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan. **Berikut Tabel 3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023.**

TABEL 3

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2023

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator (Rp.)	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		IKM	8	286,975,787,731	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		IKM	8	301,782,088,157	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Dokumen SAKIP	7	100,000,000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Dokumen SAKIP	7	100,000,000	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas Kesehatan	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	5	50,000,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas Kesehatan	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	5	50,000,000	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dinas Kesehatan	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	-	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dinas Kesehatan	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	-	

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	-	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	-
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	-	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	-
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	-	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	-
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinas Kesehatan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7	30,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinas Kesehatan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7	30,000,000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Kesehatan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	20,000,000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Kesehatan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	20,000,000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Laporan	7	150,968,067,963	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Laporan	7	146,708,411,969
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Kesehatan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1057	132,669,931,963	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Kesehatan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1057	125,770,540,749

Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	18,248,136,000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	20,887,871,220	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dinas Kesehatan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5	50,000,000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dinas Kesehatan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5	50,000,000	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah pegawai	1945	-	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah pegawai	1057	-	
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Dinas Kesehatan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1945	-	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Dinas Kesehatan	Jumlah Pakaian Dinas dan Kelengkapannya	1942	-	
Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah laporan	8	521,947,950	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dinas Kesehatan	Jumlah laporan	8	1,193,429,150	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dinas Kesehatan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2	5,998,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dinas Kesehatan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2	5,998,000	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Kesehatan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2	-	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Kesehatan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2	500,000,000	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Dinas Kesehatan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	20	108,500,000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Dinas Kesehatan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	20	129,981,200	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dinas Kesehatan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	20	50,000,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dinas Kesehatan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	20	50,000,000	

Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dinas Kesehatan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	10	50,799,950	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dinas Kesehatan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	10	50,799,950	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2	16,050,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2	16,050,000	
Fasilitas Kunjungan Tamu	Dinas Kesehatan	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	10	92,000,000	Fasilitas Kunjungan Tamu	Dinas Kesehatan	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	10	92,000,000	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas Kesehatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	37	198,600,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas Kesehatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	37	348,600,000	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Laporan rencana kebutuhan barang	108	-	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Laporan rencana kebutuhan barang	108	210,000,000	
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dinas Kesehatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	5	-	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dinas Kesehatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	5	210,000,000	
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinas Kesehatan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3	-	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinas Kesehatan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3	-	
Pengadaan Mebel	Dinas Kesehatan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	50	-	Pengadaan Mebel	Dinas Kesehatan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	50	-	

Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinas Kesehatan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	50	-	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinas Kesehatan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	50	-	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2	6,872,779,900	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Kesehatan	Laporan Penyediaan Jasa	2	5,909,997,788	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas Kesehatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	87	5,762,200,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas Kesehatan	Tagihan Rekening yang Dibayarkan	87	4,949,417,888	
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Kesehatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2	110,579,900	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Kesehatan	Tagihan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	2	110,579,900	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas Kesehatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	7	1,000,000,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas Kesehatan	jenis komponen pelayanan umum kantor yang disediakan		850,000,000	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Laporan Pemeliharaan	5	620,741,750	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Kesehatan	Laporan Pemeliharaan	5	620,741,750	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dinas Kesehatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipeliharadan dibayarkan Pajaknya	345	44,975,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dinas Kesehatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipeliharadan dibayarkan Pajaknya	345	44,975,000	

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinas Kesehatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	345	149,848,750	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinas Kesehatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	345	149,848,750	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas Kesehatan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	150	234,358,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas Kesehatan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	150	234,358,000	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dinas Kesehatan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	30	191,560,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dinas Kesehatan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	30	191,560,000	
Peningkatan Pelayanan BLUD		Terlaksananya Operasional BLUD Rumah Sakit & Puskesmas	12	127,892,250,168	Peningkatan Pelayanan BLUD		Terlaksananya Operasional BLUD Rumah Sakit & Puskesmas	12	147,039,507,500	
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Dinas Kesehatan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	12	8,750,000,000	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Dinas Kesehatan	Terlaksananya Operasional BLUD Fasilitas Kesehatan	12	11,050,000,000	
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Rasio Puskesmas terhadap jumlah penduduk		124,639,636,000	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Rasio Puskesmas terhadap jumlah penduduk	0.53	145,222,068,498	
		Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Terhadap jumlah penduduk					Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Terhadap jumlah penduduk	0.54		

Penyediaan Fasilitas dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota		Jumlah Fasilitas dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	30	22,591,548,750	Penyediaan Fasilitas dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota		Jumlah Fasilitas dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	30	46,219,509,176
Pembangunan Puskesmas	Dinas Kesehatan	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	1	8,000,000,000	Pembangunan Puskesmas	Dinas Kesehatan	Jumlah gedung Puskesmas yang dibangun	1	16,247,800,000
Pengembangan Rumah Sakit	Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM	1	150,000,000	Pengembangan Rumah Sakit	Rumah Sakit	Jumlah sarana dan prasarana kesehatan di RS	1	600,000,000
Pengembangan Puskesmas	Dinas Kesehatan	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM	26	-	Pengembangan Puskesmas	Dinas Kesehatan	Jumlah sarana dan prasarana kesehatan di Puskesmas	26	
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan	7	-	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Rumah Sakit	Jumlah gedung RS yang terpelihara	7	
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Dinas Kesehatan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan	69	3,920,000,000	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Dinas Kesehatan	Jumlah gedung puskesmas dan Puskesmas Pembantu yang terpelihara	69	4,013,127,000
Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Dinas Kesehatan	Jumlah Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	12	250,000,000	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Dinas Kesehatan	Jumlah Pengadaan Sarana Fasilitas Laboratorium, Ambulance & pusling	12	250,000,000

Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Dinas Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	2	250,000,000	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Dinas Kesehatan	Jumlah Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Laboratorium & IPAL	2	250,000,000	
Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Dinas Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	26	3,992,318,000	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Dinas Kesehatan	Jumlah pengadaan alat kesehatan di puskesmas	26	8,621,417,500	
Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Dinas Kesehatan	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center	1	-	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Dinas Kesehatan	Jumlah pengadaan dan pemeliharaan alat kesehatan yang di kalibrasi	1		
Pengadaan Obat, Vaksin	Dinas Kesehatan	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	26	3,759,490,750	Pengadaan Obat, Vaksin	Dinas Kesehatan	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	26	9,984,265,084	
Pengadaan Bahan Habis Pakai	Dinas Kesehatan	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	27	1,700,000,000	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Dinas Kesehatan	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	27	5,683,159,592	
Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Dinas Kesehatan	Jumlah Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Dilakukan Pemeliharaan	28	12,240,000	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Dinas Kesehatan	Jumlah Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Dilakukan Pemeliharaan	28	12,240,000	
Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Dinas Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dilakukan Pemeliharaan	26	150,000,000	Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Dinas Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dilakukan Pemeliharaan	26	150,000,000	

Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Dinas Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	26	257,500,000	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Dinas Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	26	257,500,000	
Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Dinas Kesehatan	Jumlah Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman yang Didistribusikan ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	26	150,000,000	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan lainnya (Dinas Kesehatan Kota Samarinda)	Dinas Kesehatan	Jumlah Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman yang Didistribusikan ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	26	150,000,000	
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	867,025	101,748,087,250	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan	Jumlah Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	867,024	98,669,819,322	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Dinas Kesehatan	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	17911	314,953,120	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Dinas Kesehatan	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	17911	2,067,331,120	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Dinas Kesehatan	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	17095	112,000,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Dinas Kesehatan	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	17095	148,240,000	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Dinas Kesehatan	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	16283	149,118,400	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Dinas Kesehatan	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	16283	154,878,400	

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Dinas Kesehatan	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	45,557	166,644,800	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Dinas Kesehatan	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	45,557	294,164,800
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Dinas Kesehatan	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	138767	166,557,400	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Dinas Kesehatan	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	138767	971,589,900
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Dinas Kesehatan	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	781822	362,822,456	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Dinas Kesehatan	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	781822	1,028,042,456
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Dinas Kesehatan	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	58,509	150,000,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Dinas Kesehatan	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	58,509	236,840,000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Dinas Kesehatan	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	309791	265,313,331	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Dinas Kesehatan	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	309791	1,261,796,341
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Dinas Kesehatan	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	32083	508,803,858	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Dinas Kesehatan	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	32083	2,138,477,858
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Dinas Kesehatan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	1300	192,882,500	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Dinas Kesehatan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	1300	1,065,892,222
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Dinas Kesehatan	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan	9129	792,310,109	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Dinas Kesehatan	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan	9129	3,424,810,109

		Pelayanan Sesuai Standar					Pelayanan Sesuai Standar			
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV	Dinas Kesehatan	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	18700	251,479,420	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV	Dinas Kesehatan	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	18700	1,451,479,420	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	59	50,000,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	59	50,000,000	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	59	50,000,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	59	50,000,000	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	4	11,105,945,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	4	4,469,313,500	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1	50,000,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1	142,000,000	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	2	125,000,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	2	418,930,000	

Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	2	313,222,000	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	2	1,586,422,000	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	2	100,000,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	2	100,000,000	
Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	2	309,000,000	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	2	923,425,000	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Dinas Kesehatan	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	1300	80,080,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Dinas Kesehatan	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	1300	80,080,000	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Dinas Kesehatan	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	1300	100,000,000	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Dinas Kesehatan	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	1300	119,500,000	
Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	3	25,000,000	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	3	25,000,000	
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	2	3,427,971,856	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	2	6,268,851,856	
Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	2	46,757,776,000	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	2	47,243,505,850	

Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Dinas Kesehatan	Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah	130	50,000,000	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Dinas Kesehatan	Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah	130	50,000,000	
Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional	Dinas Kesehatan	Jumlah Pengambilan dan pengiriman sampel penyakit potensi wabah (KLB) tepat waktu dan sesuai dengan tujuan	0	-	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional	Dinas Kesehatan	Jumlah Pengambilan dan pengiriman sampel penyakit potensi wabah (KLB) tepat waktu dan sesuai dengan tujuan	1122	98,500,000	
Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	7	500,000,000	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	7	785,000,000	
Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Dinas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	1	500,000,000	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Dinas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	1	500,000,000	
Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	4	150,000,000	Operasional Pelayanan Puskesmas	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	4	7,344,873,713	
Operasional Pelayanan Puskesmas	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	4	24,829,857,000	Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	4	3,713,629,777	

Operasional Pelayanan Untuk Puskesmas Palaran	Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	4	130,000,000	Operasional Pelayanan Untuk Puskesmas Palaran	Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	4	130,000,000	
Operasional Pelayanan Untuk Puskesmas Mangkupalas	Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	4	130,000,000	Operasional Pelayanan Untuk Puskesmas Mangkupalas	Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	4	130,000,000	
Operasional Pelayanan Untuk Puskesmas Baqa	Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	4	130,000,000	Operasional Pelayanan Untuk Puskesmas Baqa	Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	4	130,000,000	
Operasional Pelayanan Untuk Puskesmas Harapan Baru	Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	4	130,000,000	Operasional Pelayanan Untuk Puskesmas Harapan Baru	Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	4	130,000,000	
Operasional Pelayanan Untuk Puskesmas Trauma Center	Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	4	130,000,000	Operasional Pelayanan Untuk Puskesmas Trauma Center	Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	4	130,000,000	
Operasional Pelayanan Untuk Puskesmas Karang Asam	Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	4	130,000,000	Operasional Pelayanan Untuk Puskesmas Karang Asam	Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	4	130,000,000	
Operasional Pelayanan Untuk Puskesmas Loa Bakung	Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	4	130,000,000	Operasional Pelayanan Untuk Puskesmas Loa Bakung	Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	4	130,000,000	
Operasional Pelayanan Untuk Puskesmas Juanda	Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	4	130,000,000	Operasional Pelayanan Untuk Puskesmas Juanda	Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	4	130,000,000	
Operasional Pelayanan Untuk Puskesmas Wonorejo	Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	4	130,000,000	Operasional Pelayanan Untuk Puskesmas Wonorejo	Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	4	130,000,000	
Operasional Pelayanan Untuk Puskesmas Pasundan	Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	4	130,000,000	Operasional Pelayanan Untuk Puskesmas Pasundan	Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	4	130,000,000	

Operasional Pelayanan Untuk Puskesmas Segiri	Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	4	130,000,000	Operasional Pelayanan Untuk Puskesmas Segiri	Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	4	130,000,000	
Operasional Pelayanan Untuk Puskesmas Air Putih	Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	4	130,000,000	Operasional Pelayanan Untuk Puskesmas Air Putih	Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	4	130,000,000	
Operasional Pelayanan Untuk Puskesmas Remaja	Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	4	130,000,000	Operasional Pelayanan Untuk Puskesmas Remaja	Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	4	130,000,000	
Operasional Pelayanan Untuk Puskesmas Temindung	Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	4	130,000,000	Operasional Pelayanan Untuk Puskesmas Temindung	Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	4	130,000,000	
Operasional Pelayanan Untuk Puskesmas Sidomulyo	Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	4	130,000,000	Operasional Pelayanan Untuk Puskesmas Sidomulyo	Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	4	130,000,000	
Operasional Pelayanan Untuk Puskesmas Sambutan	Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	4	130,000,000	Operasional Pelayanan Untuk Puskesmas Sambutan	Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	4	130,000,000	
Operasional Pelayanan Untuk Puskesmas Sungai Kapih	Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	4	130,000,000	Operasional Pelayanan Untuk Puskesmas Sungai Kapih	Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	4	130,000,000	
Operasional Pelayanan Untuk Puskesmas Makroman	Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	4	130,000,000	Operasional Pelayanan Untuk Puskesmas Makroman	Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	4	130,000,000	
Operasional Pelayanan Untuk Puskesmas Lempake	Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	4	130,000,000	Operasional Pelayanan Untuk Puskesmas Lempake	Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	4	130,000,000	
Operasional Pelayanan Untuk Puskesmas Sungai Siring	Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	4	130,000,000	Operasional Pelayanan Untuk Puskesmas Sungai Siring	Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	4	130,000,000	

Operasional Pelayanan Untuk Puskesmas Bukuan	Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	4	130,000,000	Operasional Pelayanan Untuk Puskesmas Bukuan	Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	4	130,000,000	
Operasional Pelayanan Untuk Puskesmas Bantuas	Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	4	130,000,000	Operasional Pelayanan Untuk Puskesmas Bantuas	Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	4	130,000,000	
Operasional Pelayanan Untuk Puskesmas Bengkuring	Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	4	130,000,000	Operasional Pelayanan Untuk Puskesmas Bengkuring	Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	4	130,000,000	
Operasional Pelayanan Untuk Puskesmas Lok Bahu	Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	4	130,000,000	Operasional Pelayanan Untuk Puskesmas Lok Bahu	Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	4	130,000,000	
Operasional Pelayanan Untuk Puskesmas Sempaja	Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	4	130,000,000	Operasional Pelayanan Untuk Puskesmas Sempaja	Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	4	130,000,000	
Operasional Pelayanan Untuk Puskesmas Samarinda Kota	Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	4	130,000,000	Operasional Pelayanan Untuk Puskesmas Samarinda Kota	Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	4	130,000,000	
Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	6	300,000,000	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	6	300,000,000	
Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	39	200,000,000	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	39	465,895,000	
Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Dinas Kesehatan	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	4	376,350,000	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Dinas Kesehatan	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	4	776,350,000	

Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	59	35,000,000	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	59	35,000,000	
Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Dinas Kesehatan	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	1	5,500,000,000	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Dinas Kesehatan	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	1	5,500,000,000	
Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi		Jumlah Faskes Terintegrasi dalam sistem Informasi Kesehatan	30	200,000,000	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi		Jumlah Faskes Terintegrasi dalam sistem Informasi Kesehatan	30	200,000,000	
Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	4	100,000,000	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	4	100,000,000	
Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	26	100,000,000	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	26	100,000,000	
Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaen/Kota		Jumlah Izin Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan		100,000,000	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaen/Kota		Jumlah Izin Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan		132,740,000	

Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C dan D	Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	13	50,000,000	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C dan D	Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	13	50,000,000	
Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Rumah Sakit	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	39	25,000,000	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Rumah Sakit	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	39	57,740,000	
Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	10	25,000,000	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	10	25,000,000	
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN					PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN				2,273,645,000	
Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota				100,000,000	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota				100,000,000	
Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	3000	50,000,000	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	3000	50,000,000	
Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut	3000	50,000,000	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut	3000	50,000,000	

		Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan					Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan			
Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota				674,550,000			Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota		674,550,000	
Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	30	50,000,000	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	30	50,000,000	
Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Dinas Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (fasyankes)	1400	400,000,000	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Dinas Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (fasyankes)	1400	400,000,000	
Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	5	224,550,000	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	5	224,550,000	

Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				1,349,095,000	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				1,499,095,000	
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	250	1,349,095,000	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	250	1,499,095,000	
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN					PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN				497,716,000	
Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)		Jumlah Izin yang dikeluarkan	50	-	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)		Jumlah Izin yang dikeluarkan	50	86,148,000	
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	50	-	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	50	86,148,000	

Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga		Jumlah Rumah Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	1300	-	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga		Jumlah Rumah Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	1300	230,450,000	
Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	150	-	Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	150	230,450,000	
Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga		Jumlah PIRT yang diperiksa dan Diawasi	100	30,000,000	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga		Jumlah PIRT yang diperiksa dan Diawasi	100	181,118,000	

Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Dinas Kesehatan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan/Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	100	30,000,000	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Dinas Kesehatan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan/Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	100	181,118,000
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		Persentase Murunnya Angka Kesakitan Penyakit Tidak Menular	-0.5	595,080,000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		Persentase Murunnya Angka Kesakitan Penyakit Tidak Menular	-0.5	1,194,378,000
Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah Laporan Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan	1	80,000,000	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah Laporan Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan	1	151,450,000
Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1	80,000,000	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1	151,450,000
Pelaksanaan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan Hidup Bersih dan sehat	17	250,080,000	Pelaksanaan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan Hidup Bersih dan sehat	17	303,178,000

Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Dinas Kesehatan	Jumlah penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan Hidup Bersih dan sehat	19	250,080,000	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Dinas Kesehatan	Jumlah penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan Hidup Bersih dan sehat	19	250,080,000	
Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Dinas Kesehatan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Sersih dan Sehat	59	53,098,000	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Dinas Kesehatan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Sersih dan Sehat	59	53,098,000	
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Bimbingan Teknis, Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Sehat	2	265,000,000	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Bimbingan Teknis, Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Sehat	2	739,750,000	
Bimbingan Teknis Dan Supervisi Pengembangan Dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2	265,000,000	Bimbingan Teknis Dan Supervisi Pengembangan Dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2	739,750,000	

2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Dinas Kesehatan Kota Samarinda akan menelaah dan menambah usulan program dan kegiatan yang diusulkan bila usulan seiring dengan tupoksi Dinas Kesehatan. Usulan dapat berasal dari UPTD, para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan.



BAB III



BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAK NASIONAL

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Samarinda mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan No. 4 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan mencakup Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Jenis pelayanan dasar pada SPM kesehatan daerah provinsi terdiri atas:

- 1) pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi; dan
- 2) pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi.

Jenis pelayanan dasar dan penerimanya di Pemerintah Kabupaten/Kota:

- 1) Pelayanan kesehatan ibu hamil;
- 2) Pelayanan kesehatan ibu bersalin;
- 3) Pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
- 4) Pelayanan kesehatan balita;
- 5) Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
- 6) Pelayanan kesehatan pada usia produktif;
- 7) Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
- 8) Pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
- 9) Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
- 10) Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;

- 11) Pelayanan kesehatan orang terduga tuberculosis; dan
- 12) Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immundeficiency Virus).

Selain itu, perumusan kegiatan bidang kesehatan yang perlu diperhatikan dalam penyusunan RKPD Tahun 2022 antara lain:

- 1) Peningkatan kesehatan ibu dan anak;
- 2) Pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular (selain yang ditetapkan melalui SPM):
 - a. Malaria
 - b. Penyakit Tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta)
 - c. Penurunan prevalensi merokok pada usia ≤ 18 tahun
 - d. Penurunan prevalensi obesitas pada penduduk usia 18 +
- 3) Peningkatan penduduk yang menjadi peserta BPJS Kesehatan dan penduduk yang menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS);
- 4) Promotif dan preventif Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas);

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Renja Dinas Kesehatan Kota Samarinda mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kota Samarinda Tahun 2022-2026, dimana kedua dokumen tersebut merupakan bentuk pelaksanaan teknis dari visi dan misi yang tertuang dalam RPJMD Kota Samarinda Tahun 2022-2026.

Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam RENJA Dinas

Kesehatan Kota Samarinda Tahun 2023 sesuai Visi dan Misi, sebagai berikut:

1. Tujuan Dinas Kesehatan

Tujuan Dinas Kesehatan sebagai penjabaran Misi Kota Samarinda adalah :

“MENINGKATKAN DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT KOTA SAMARINDA”

2. Sasaran

Berdasarkan matrikulasi kewenangan daerah di bidang kesehatan dan arahan Perwali No 11 Tahun 2008 tentang Dinas Kesehatan, maka isu-isu strategis yang telah dijabarkan/diterjemahkan kedalam Sasaran dan Strategi Kota Samarinda.

Sasaran Pembangunan Kesehatan di Kota Samarinda adalah :

- a. Tersedianya akses dan pelayanan kesehatan secara merata;
- b. Meningkatkan kinerja dan pelayanan.

Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Kesehatan kepada Masyarakat, Dinas Kesehatan Kota Samarinda ditunjang dengan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Samarinda berdasarkan Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 68 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Samarinda. Beberapa ketentuan tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Samarinda sebagai berikut :

- a. Dinas ;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 - 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Kesehatan Masyarakat, membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional;
- d. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional;
- e. Bidang Pelayanan Kesehatan, membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional;
- f. Bidang Sumber Daya Kesehatan, membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- h. UPTD

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan Kota Samarinda

1. Tugas Pokok Dinas Kesehatan Kota

- a. Dinas mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan konkuren bidang kesehatan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.
- b. Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Fungsi Dinas Kesehatan Kota

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas mempunyai fungsi :

- a. penyusunan kebijakan, program dan kegiatan bidang kesehatan;
- b. perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, dan kefarmasian, alat kesehatan, dan sumber daya kesehatan;
- c. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan dinas kesehatan;
- d. Penerbitan izin bidang kesehatan;
- e. Pengelolaan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab dinas kesehatan;
- f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang kesehatan;
- g. Pengawasan dan pengendalian bidang kesehatan;
- h. Pembinaan dan pengendalian Unit Pelaksana Teknis;
- i. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Tugas Sekretariat

- a. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi kepegawaian, urusan rumah tangga dinas, keprotokolan, kehumasan dan perjalanan dinas, pemberian dukungan administrasi kepada seluruh

- unsur organisasi di lingkungan Dinas Kesehatan dan pengelolaan barang milik Daerah serta evaluasi dan pelaporan;
- b. Sekretariat dipimpin oleh sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas;
 - c. Sekretariat membawahkan sub bagian yang dipimpin oleh kepala sub bagian dan bertanggungjawab langsung kepada sekretaris.

Fungsi Sekretariat

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan kesekretariatan;
- b. pengoordinasian penyusunan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah;
- c. pengoordinasian penyusunan dan pelaksanaan Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
- d. pelaksanaan dan pembinaan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan;
- e. pengelolaan urusan kehumasan, keprotokolan, kepustakaan, dan layanan informasi dan pengaduan;
- f. pelaksanaan administrasi dan pembinaan kepegawaian;
- g. pengelolaan anggaran Dinas dan penerimaan dinas/retribusi;
- h. pelaksanaan administrasi keuangan dan pembayaran gaji pegawai;
- i. pelaksanaan verifikasi Surat Pertanggungjawaban keuangan;
- j. pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;

- k. fasilitasi penyusunan dan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Minimal (SPM), Standar Pelayanan Publik (SPP), Maklumat Pelayanan dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM);
- l. pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat/pelanggan;
- m. pengelolaan pengaduan masyarakat sesuai tugas fungsi Dinas;
- n. pengelolaan informasi dan dokumentasi dan pelaksanaan fungsi Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Pembantu;
- o. pengoordinasian pengelolaan data, pengembangan sistem teknologi informasi/aplikasi untuk aplikasi yang digunakan lintas bidang pada Dinas;
- p. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi;
- q. pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
- r. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

A. Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :

- a. menyusun dan melaksanakan rencana program dan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya;
- b. menyusun rencana usulan kebutuhan anggaran keuangan;
- c. mengkoordinir penyusunan RKA/DPA/DPPA Dinas;
- d. memeriksa/meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

- e. melaksanakan verifikasi SPP;
- f. melaksanakan sistem akuntansi pengelolaan keuangan Dinas;
- g. melaksanakan penyiapan surat perintah membayar (SPM);
- h. melaksanakan verifikasi harian atas penerimaan;
- i. menyusun rekapitulasi penyerapan keuangan sebagai bahan evaluasi kinerja keuangan;
- j. menyusun neraca keuangan Dinas;
- k. mengkoordinir dan meneliti anggaran perubahan Dinas;
- l. menyusun laporan keuangan dinas;
- m. membuat pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi;
- n. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
- o. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

B. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. menyusun dan melaksanakan rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- b. melaksanakan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, dan ketatausahaan;
- c. mengelola tertib administrasi perkantoran dan kearsipan;
- d. melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan mempersiapkan sarana prasarana kantor;
- e. menyusun rencana kebutuhan alat-alat kantor, barang inventaris

kantor/rumah tangga;

- f. melaksanakan pengadaan, pemeliharaan sarana, prasarana kantor dan pengelolaan inventarisasi barang;
- g. melaksanakan pencatatan, pengadministrasian dan pengelolaan barang daerah dan aset daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas;
- h. melaksanakan pelayanan administrasi perjalanan Dinas;
- i. mempersiapkan penyelenggaraan bimbingan teknis tertentu dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai;
- j. menyelenggarakan administrasi kepegawaian dan penempatan pegawai non struktural dan fungsional;
- k. menyusun bahan pembinaan kedisiplinan pegawai;
- l. menyiapkan dan memproses usulan pendidikan dan pelatihan pegawai
- m. mengelola informasi dan dokumentasi dan pelaksanaan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pembantu melalui website maupun permintaan data langsung;
- n. menyusun tatalaksana dan Standar Pelayanan penanganan pengaduan dan pemberian informasi, melaksanakan tugas kehumasan dan keprotokolan; memfasilitasi penyusunan dan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Minimal (SPM), Standar Pelayanan Publik (SPP), Maklumat Pelayanan dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM);
- o. membuat pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi;
- p. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan

- q. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

3. Bidang Kesehatan Masyarakat

- a. Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Bidang Kesehatan Masyarakat dipimpin oleh kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung pada Kepala Dinas.

Fungsi Bidang Kesehatan Masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a) penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan berkaitan tugas dan fungsi;
- b) perumusan kebijakan di bidang peningkatan kesehatan keluarga, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga, gizi masyarakat serta promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;
- c) pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan kesehatan keluarga, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga, gizi masyarakat serta promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;
- d) penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peningkatan kesehatan keluarga, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga, gizi masyarakat serta promosi kesehatan dan

pemberdayaan masyarakat;

- e) pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan kesehatan keluarga, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga, gizi masyarakat serta promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;
- f) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang peningkatan Kesehatan keluarga, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga, gizi masyarakat serta promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;
- g) pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

- a. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai tugas merumuskan kebijakan, bahan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular serta pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa.
- b. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dipimpin oleh kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

Fungsi Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai fungsi :

- a) pelaksanaan dan penyusunan rencana program dan kegiatan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi;
- b) penyiapan bahan perumusan kebijakan surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular serta pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
- c) penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular serta pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan gangguan jiwa;
- d) penyiapan norma, standar, prosedur dan kriteria surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular serta pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan gangguan jiwa;
- e) penyiapan bahan bimbingan teknis, supervisi bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan gangguan jiwa;
- f) penyiapan rencana kegiatan surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan gangguan jiwa;
- g) pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pencegahan dan pengendalian penyakit;
- h) pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan wabah/ klb;
- i) penurunan angka kesakitan dan kematian penyakit potensial wabah;
- j) pembuatan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi;
- k) pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan

- l) pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

5. Bidang Pelayanan Kesehatan

- a. Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan rujukan dan pelayanan kesehatan tradisional serta registrasi fasilitas pelayanan kesehatan.
- b. Bidang Pelayanan Kesehatan dipimpin oleh kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

Fungsi Bidang Pelayanan Kesehatan

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai fungsi :

- a) penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- b) penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan rujukan dan pelayanan Kesehatan tradisional serta registrasi fasilitas pelayanan kesehatan;
- c) penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan rujukan dan pelayanan Kesehatan tradisional serta registrasi fasilitas pelayanan kesehatan;
- d) penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan

- Kesehatan primer, pelayanan kesehatan rujukan dan pelayanan kesehatan tradisional serta registrasi fasilitas pelayanan kesehatan;
- e) pemantauan evaluasi, dan pelaporan di bidang pelayanan Kesehatan primer, pelayanan kesehatan rujukan dan pelayanan kesehatan tradisional serta registrasi fasilitas pelayanan kesehatan;
 - f) pembuatan laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya;
 - g) pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
 - h) pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

6. Bidang Sumber Daya Kesehatan

- a. Bidang Sumber Daya Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang kefarmasian, alat kesehatan dan sumber daya manusia kesehatan.
- b. Bidang Sumber Daya Kesehatan dipimpin oleh kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

Fungsi Bidang Sumber Daya Kesehatan

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Sumber Daya Kesehatan mempunyai fungsi :

- a) penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- b) penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang kefarmasian,

- alat kesehatan dan sumber daya manusia kesehatan;
- c) penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan sumber daya manusia kesehatan;
 - d) penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan sumber daya manusia kesehatan;
 - e) pemantauan evaluasi, dan pelaporan di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan sumber daya manusia kesehatan;
 - f) pembuatan laporan hasil dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi;
 - g) pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
 - h) pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/ pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kesehatan sesuai dengan keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

- a. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dapat dibagi dalam berbagai kelompok sesuai sifat dan keahliannya;
- b. Setiap kelompok sebagaimana dimaksud dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- c. Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

- d. Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional serta Rincian Tugas Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)

Dilingkungan Dinas Kesehatan Samarinda terdapat UPTD yang terdiri dari :

- a. UPTD Instalasi Farmasi Kelas A;
- b. UPTD berupa Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskemas) meliputi:
 - 1) UPTD Puskemas Trauma Center Kelas A;
 - 2) UPTD Puskemas Air Putih Kelas A;
 - 3) UPTD Puskemas Baqa Kelas A;
 - 4) UPTD Puskemas Bengkuring Kelas A;
 - 5) UPTD Puskemas Juanda Kelas A;
 - 6) UPTD Puskemas Karang Asam Kelas A;
 - 7) UPTD Puskemas Lempake Kelas A;
 - 8) UPTD Puskemas Loa Bakung Kelas A;
 - 9) UPTD Puskemas Mangkupalas Kelas A;
 - 10) UPTD Puskemas Palaran Kelas A;
 - 11) UPTD Puskemas Pasundan Kelas A;
 - 12) UPTD Puskemas Remaja Kelas A;
 - 13) UPTD Puskemas Sambutan Kelas A;
 - 14) UPTD Puskemas Segiri Kelas A;
 - 15) UPTD Puskemas Sempaja Kelas A;
 - 16) UPTD Puskemas Sidomulyo Kelas A;
 - 17) UPTD Puskemas Sungai Siring Kelas A;

- 18) UPTD Puskesmas Temindung Kelas A;
- 19) UPTD Puskesmas Wonorejo Kelas A;
- 20) UPTD Puskesmas Sungai Kapih Kelas A;
- 21) UPTD Puskesmas Harapan Baru Kelas A;
- 22) UPTD Puskesmas Makroman Kelas A;
- 23) UPTD Puskesmas Bukuan Kelas A;
- 24) UPTD Puskesmas Bantuas Kelas A;
- 25) UPTD Puskesmas Samarinda Kota Kelas A; dan
- 26) UPTD Puskesmas Lok Bahu Kelas A

c. UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kelas A.

UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah mempunyai tugas membantu kelancaran tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas dalam pengelolaan Laboratorium Kesehatan Daerah yang meliputi pemeliharaan, pengendalian, pengawasan dan pelayanan uji laboratorium sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria berdasarkan manajemen kesehatan yang diarahkan Kepala Dinas yang searah dengan kebijakan umum daerah, serta melaksanakan urusan ketatausahaan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah.

Dalam menyelenggarakan tugas UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana teknis operasional UPTD Laboratorium Kesehatan;
- b. penyiapan bahan rumusan kebijakan dibidang kesehatan;

- c. penyusunan dan pelaksanaan standard pelayanan publik dan standar operasional prosedur;
- d. pelayanan pemeriksaan dibidang laboratorium klinik meliputi pemeriksaan hematologic, kimia klinik, mikrobiologi klinik, parasitologi klinik, imunologi klinik, patalogi anatomi dan atau bidang lain yang berkaitan dengan kepentingan kesehatan perorangan terutama menunjang upaya diagnosis penyakit, penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan;
- e. pelayanan pemeriksaan dibidang Laboratorium non klinik meliputi pemeriksaan dibidang mikrobiologi, fisika, kimia dan atau bidang lain yang berkaitan dengan kepentingan kesehatan masyarakat dan kesehatan lingkungan terutama untuk menunjang upaya pencegahan penyakit dan peningkatan kesehatan masyarakat;
- f. melaksanakan kegiatan pemantapan mutu internal dan eksternal;
- g. penerapan teknologi pada laboratorium kesehatan;
- h. pemeliharaan peralatan laboratorium;
- i. melaksanakan K3 (kesehatan, keamanan, dan keselamatan kerja) dilaboratorium dan mengelola limbah laboratorium sesuai dengan lingkup tugasnya;
- j. pelaksanaan evaluasi dan monitoring pelaksanaan kegiatan;
- k. penyusunan dan penyampaian laporan pelaksanaan kegiatan; dan
- l. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya sesuai dengan bidang tugasnya.

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Dinas Kesehatan Kota Samarinda mengusulkan Program/Kegiatan sesuai dengan sasaran dan strategi adapun Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2023 dan Perkiraan Maju Tahun 2024 Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut :

Tabel 4
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2023 dan Perkiraan Maju Tahun 2024
Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur

Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2023		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	5	6	9	10
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				450,969,895,655		528,511,308,240
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM	Dokumen	80.3	301,782,088,157	82.3	285,276,196,329
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akip	Dokumen	7.3	100,000,000	7.5	200,000,000

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	7	50,000,000	7	100,000,000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	1	30,000,000	3	50,000,000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	laporan	4	20,000,000	4	50,000,000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan	laporan	7	146,708,411,969	7	177,773,508,841
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/bulan	1057	125,770,540,749	1057	156,362,541,841
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	888	20,887,871,220	888	21,360,967,000

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	laporan	1	50,000,000	5	50,000,000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai	orang		-	1945	64,714,900
Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	unit		-	10	16,974,400
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen		-	4	15,913,500
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen		-	4	15,913,500
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen		-	4	15,913,500

Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan	laporan	8	1,193,429,150	8	621,947,950
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	2	5,998,000	2	5,998,000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	2	500,000,000	2	100,000,000
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (Dinas Kesehatan Kota Samarinda)	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	paket	20	129,981,200	20	108,500,000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Dinas Kesehatan Kota Samarinda)	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	20	50,000,000	30	50,000,000
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (Dinas Kesehatan Kota Samarinda)	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	paket	10	50,799,950	50	50,799,950

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (Dinas Kesehatan Kota Samarinda)	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	2	16,050,000	2	16,050,000
Fasilitasi Kunjungan Tamu (Dinas Kesehatan Kota Samarinda)	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	laporan	900	92,000,000	1000	92,000,000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dinas Kesehatan Kota Samarinda)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	37	348,600,000	37	198,600,000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan rencana kebutuhan barang	laporan	150	210,000,000	158	-
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (Dinas Kesehatan Kota Samarinda)	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	5	210,000,000		-

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Penyediaan Jasa	laporan	2	5,909,997,788	4	6,059,997,788
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Dinas Kesehatan Kota Samarinda)	Laporan Penyediaan Jasa	laporan	87	4,949,417,888	12	4,949,417,888
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Dinas Kesehatan Kota Samarinda)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	2	110,579,900	2	110,579,900
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Dinas Kesehatan Kota Samarinda)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	7	850,000,000	4	1,000,000,000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Pemeliharaan	laporan	5	620,741,750	4	620,741,750

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (Dinas Kesehatan Kota Samarinda)	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	345	44,975,000	345	44,975,000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Dinas Kesehatan Kota Samarinda)	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	345	149,848,750	345	149,848,750
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Dinas Kesehatan Kota Samarinda)	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	150	234,358,000	150	234,358,000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (Dinas Kesehatan Kota Samarinda)	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	Unit	30	191,560,000	30	191,560,000

Peningkatan Pelayanan BLUD	Terlaksananya Operasional BLUD Rumah Sakit & Puskesmas	bulan	12	147,039,507,500	12	100,000,000,000
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Dinas Kesehatan Kota Samarinda)	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	unit kerja	1	11,050,000,000	1	3,200,000,000
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (UPT Puskesmas Bengkuring)	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	unit kerja	1	-	1	500,000,000
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (UPT Puskesmas Harapan Baru)	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	unit kerja	1	-	1	500,000,000
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (UPT Puskesmas Juanda)	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	unit kerja	1	-	1	500,000,000

Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (UPT Puskesmas Sidomulyo)	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	unit kerja	1	-	1	1,000,000,000
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (UPT Puskesmas Makroman)	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	unit kerja	1	-	1	500,000,000
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (UPT Puskesmas Bukuan)	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	unit kerja	1	-	1	500,000,000
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (UPT Puskesmas Lok Bahu)	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	unit kerja	1	-	1	500,000,000
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (UPT Puskesmas Karang Asam)	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	unit kerja	1	-	1	750,000,000

Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Labkesda Kota)	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	unit kerja	1	-	1	3,000,000,000
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (UPT Puskesmas Bantuas)	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	unit kerja	1	596,171,364	1	500,000,000
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (UPT Puskesmas Trauma Center)	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	unit kerja	1	4,186,814,865	1	4,200,000,000
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (UPT Puskesmas Temindung)	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	unit kerja	1	2,145,724,088	1	-
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (UPT Puskesmas Kampung Baqa)	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	unit kerja	1	1,948,447,398	1	2,100,000,000

Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (RSUD IA. MOEIS)	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	unit kerja	1	114,258,304,788	1	70,000,000,000
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (UPT Puskesmas Segiri)	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	unit kerja	1	2,528,030,586	1	3,000,000,000
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (UPT Puskesmas Palaran)	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	unit kerja	1	2,690,103,602	1	2,300,000,000
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (UPT Puskesmas Sungai Siring)	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	unit kerja	1	955,679,548	1	1,150,000,000
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (UPT Puskesmas Air Putih)	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	unit kerja	1	1,523,704,893	1	1,500,000,000

Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (UPT Puskesmas Samarinda Kota)	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	unit kerja	1	922,641,199	1	600,000,000
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (UPT Puskesmas Wonorejo)	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	unit kerja	1	1,790,142,073	1	1,400,000,000
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (UPT Puskesmas Lempake)	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	unit kerja	1	2,443,743,096	1	2,300,000,000
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rasio Puskesmas terhadap jumlah penduduk	Rasio	0.55	145,222,068,498	0.57	235,697,136,011
	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Terhadap jumlah penduduk	Rasio	1.47		1.47	

Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	Faskes	31	46,219,509,176	32	125,567,617,827
Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Terpenuhinya Rumah Sakit Baru dengan Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	unit		-	1	4,765,000,000
Pembangunan Puskesmas (Dinas Kesehatan Kota Samarinda)	Terbangunnya Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas)	Unit	1	16,247,800,000	2	45,065,597,327
pembangunan fasilitas kesehatan lainnya	Terbangunnya Fasilitas Kesehatan Lainnya	unit		-	1	8,000,000,000
Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Terbangunnya Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	unit		-	26	100,000,000

Pengembangan Rumah Sakit (Dinas Kesehatan Kota Samarinda)	Tersedianya Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	Unit	1	600,000,000	0	-
Pengembangan Puskesmas	Tersedianya Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	unit			26	6,640,000,000
Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Terlaksananya Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya Sesuai Standar	unit		-	5	2,060,000,000

Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Tersedianya Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	unit		-	7	2,100,000,000
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas (Dinas Kesehatan Kota Samarinda)	Tersedianya Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Puskesmas	Unit	28	4,013,127,000	69	5,000,000,000
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Tersedianya Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	unit		-	3	1,000,000,000
Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Dinas Kesehatan Kota Samarinda)	Tersedianya Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Unit	10	250,000,000	4	-

Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Dinas Kesehatan Kota Samarinda)	Tersedianya Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Unit	10	250,000,000	2	-
Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Dinas Kesehatan Kota Samarinda)	Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Unit	26	8,621,417,500	26	10,052,485,000
Pengadaan Obat, Vaksin (Dinas Kesehatan Kota Samarinda)	Tersedianya Obat dan Vaksin	paket	26	9,984,265,084	26	
Pengadaan Bahan Habis Pakai (Dinas Kesehatan Kota Samarinda)	Tersedianya Bahan Habis Pakai	paket	27	5,683,159,592	27	
Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Dinas Kesehatan Kota Samarinda)	Terpeliharanya Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Unit	4	12,240,000	28	

Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Dinas Kesehatan Kota Samarinda)	Terpeliharanya Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Unit	4	150,000,000	26	
Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Dinas Kesehatan Kota Samarinda)	Terpeliharanya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar	Unit	26	257,500,000	26	160,000,000
Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dinas Kesehatan Kota Samarinda)	Terlaksananya Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	paket	26	150,000,000	26	

Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	unit		-	1	25,500,000,000
Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	paket		-	26	14,864,535,500

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	keluarga		-	100	100,000,000
Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan (UPT INSTALASI FARMASI	Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	paket	0	-	29	160,000,000
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	jiwa	893,036	98,669,819,322	919,827	108,236,778,184

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Dinas Kesehatan Kota Samarinda)	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	14578	2,067,331,120	19702	2,526,961,120
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin (Dinas Kesehatan Kota Samarinda)	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	13701	148,240,000	18804	356,000,000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir (Dinas Kesehatan Kota Samarinda)	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	12995	154,878,400	17911	350,000,000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita (Dinas Kesehatan Kota Samarinda)	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	63354	294,164,800	50557	466,000,000

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar (Dinas Kesehatan Kota Samarinda)	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	150200	971,589,900	152643	1,155,032,500
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (Dinas Kesehatan Kota Samarinda)	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	607585	1,028,042,456	860004	1,015,220,000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut (Dinas Kesehatan Kota Samarinda)	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	58509	236,840,000	64360	436,840,000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi (Dinas Kesehatan Kota Samarinda)	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	309791	1,261,796,341	340770	781,533,010

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (Dinas Kesehatan Kota Samarinda)	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	32083	2,138,477,858	35291	1,326,077,858
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (Dinas Kesehatan Kota Samarinda)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Orang	1300	1,065,892,222	1430	650,000,000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (Dinas Kesehatan Kota Samarinda)	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	15050	3,424,810,109	10042	2,517,000,000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV (Dinas Kesehatan Kota Samarinda)	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	25494	1,451,479,420	20570	778,000,000

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) (Dinas Kesehatan Kota Samarinda)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Dokumen	4	50,000,000	4	100,000,000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana (Dinas Kesehatan Kota Samarinda)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	Dokumen	4	50,000,000	4	100,000,000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dinas Kesehatan Kota Samarinda)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	4	4,469,313,500	4	8,134,752,500
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dinas Kesehatan Kota Samarinda)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dokumen	4	142,000,000	4	267,000,000

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dinas Kesehatan Kota Samarinda)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	4	418,930,000	4	504,580,000
Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dinas Kesehatan Kota Samarinda)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dokumen	4	1,586,422,000	4	2,065,299,826
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya (Dinas Kesehatan Kota Samarinda)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Dokumen	4	100,000,000	4	150,000,000
Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dinas Kesehatan Kota Samarinda)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dokumen	4	923,425,000	4	1,164,425,000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) (Dinas Kesehatan Kota Samarinda)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Orang	1300	80,080,000	1430	100,000,000

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA (Dinas Kesehatan Kota Samarinda)	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Orang	1300	119,500,000	1430	119,500,000
Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus (Dinas Kesehatan Kota Samarinda)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	Dokumen	4	25,000,000	4	-
Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Dokumen	0	-	4	100,000,000
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dinas Kesehatan Kota Samarinda)	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	4	6,268,851,856	4	3,844,776,880
Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Dinas Kesehatan Kota Samarinda)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dokumen	40000	47,243,505,850	4	53,710,776,000

Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah (Dinas Kesehatan Kota Samarinda)	Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah	Orang	130	50,000,000	138	50,000,000
Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional (Dinas Kesehatan Kota Samarinda)	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	paket	1122	98,500,000	1235	198,500,000
Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat (Dinas Kesehatan Kota Samarinda)	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Dokumen	7	785,000,000	7	500,000,000

Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Dinas Kesehatan Kota Samarinda)	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan <i>Telemedicine</i> untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	Unit	1	500,000,000	1	-
Operasional Pelayanan Rumah Sakit (Dinas Kesehatan Kota Samarinda)	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Dokumen	4	7,344,873,713	4	7,344,873,713
Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	dokumen	4	3,713,629,777	4	4,613,629,777
Operasional Pelayanan Puskesmas (UPT Karang Asam)	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	dokumen	4	130,000,000	4	100,000,000
Operasional Pelayanan Puskesmas (UPT Puskesmas Loa Bakung)	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	dokumen	4	130,000,000	4	170,000,000

Operasional Pelayanan Puskesmas (UPT Puskesmas Bantuas)	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	dokumen	4	130,000,000	4	100,000,000
Operasional Pelayanan Puskesmas (UPT Puskesmas Kampung Baqa)	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	dokumen	4	130,000,000	4	100,000,000
Operasional Pelayanan Puskesmas (UPT Puskesmas Makroman)	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	dokumen	4	130,000,000	4	100,000,000
Operasional Pelayanan Puskesmas (UPT Puskesmas Palaran)	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	dokumen	4	130,000,000	4	100,000,000
Operasional Pelayanan Puskesmas (UPT Puskesmas Air Putih)	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	dokumen	4	130,000,000	4	100,000,000
Operasional Pelayanan Puskesmas (UPT Puskesmas Juanda)	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	dokumen	4	130,000,000	4	100,000,000

Operasional Pelayanan Puskesmas (UPT Puskesmas Samarinda Kota)	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	dokumen	4	130,000,000	4	100,000,000
Operasional Pelayanan Puskesmas (UPT Puskesmas Bengkuring)	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	dokumen	4	130,000,000	4	100,000,000
Operasional Pelayanan Puskesmas (UPT Puskesmas Mangkupalas)	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	dokumen	4	130,000,000	4	170,000,000
Operasional Pelayanan Puskesmas (UPT Puskesmas Sungai Kapih)	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	dokumen	4	130,000,000	4	170,000,000
Operasional Pelayanan Puskesmas (UPT Puskesmas Remaja)	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	dokumen	4	130,000,000	4	170,000,000
Operasional Pelayanan Puskesmas (UPT Puskesmas Segiri)	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	dokumen	4	130,000,000	4	100,000,000

Operasional Pelayanan Puskesmas (UPT Puskesmas Sambutan)	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	dokumen	4	130,000,000	4	170,000,000
Operasional Pelayanan Puskesmas (UPT Puskesmas Sungai Siring)	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	dokumen	4	130,000,000	4	100,000,000
Operasional Pelayanan Puskesmas (UPT Puskesmas Sidomulyo)	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	dokumen	4	130,000,000	4	100,000,000
Operasional Pelayanan Puskesmas (UPT Puskesmas Sempaja)	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	dokumen	4	130,000,000	4	170,000,000
Operasional Pelayanan Puskesmas (UPT Puskesmas Temindung)	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	dokumen	4	130,000,000	4	170,000,000
Operasional Pelayanan Puskesmas (UPT Puskesmas Trauma Center)	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	dokumen	4	130,000,000	4	100,000,000

Operasional Pelayanan Puskesmas (UPT Puskesmas Lempake)	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	dokumen	4	130,000,000	4	100,000,000
Operasional Pelayanan Puskesmas (UPT Puskesmas Lok Bahu)	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	dokumen	4	130,000,000	4	100,000,000
Operasional Pelayanan Puskesmas (UPT Puskesmas Bukuan)	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	dokumen	4	130,000,000	4	100,000,000
Operasional Pelayanan Puskesmas (UPT Puskesmas Harapan Baru)	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	dokumen	4	130,000,000	4	100,000,000
Operasional Pelayanan Puskesmas (UPT Puskesmas Pasundan)	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	dokumen	4	130,000,000	4	170,000,000
Operasional Pelayanan Puskesmas (UPT Puskesmas Wonorejo)	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	dokumen	4	130,000,000	4	100,000,000

Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dinas Kesehatan Kota Samarinda)	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Dokumen	4	300,000,000	4	400,000,000
Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota (Dinas Kesehatan Kota Samarinda)	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota Samarinda)	Unit	4	465,895,000	39	300,000,000
Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) (Dinas Kesehatan Kota Samarinda)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	laporan	4	776,350,000	4	1,200,000,000
Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah (Dinas Kesehatan Kota Samarinda)	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Dokumen	4	35,000,000	4	50,000,000

Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) (Dinas Kesehatan Kota Samarinda)	Jumlah <i>Public Safety Center</i> (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Unit	1	5,500,000,000	1	6,200,000,000
Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	0	-	10042	500,000,000
Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	orang	0	-	20570	500,000,000

Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	0	-	588	500,000,000
Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Jumlah Faskes Terintegrasi dalam sistem Informasi Kesehatan	Faskes	31	200,000,000	32	1,230,000,000
Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan (Dinas Kesehatan Kota Samarinda)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Dokumen	4	100,000,000	4	-
Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (Dinas Kesehatan Kota Samarinda)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Dokumen	4	100,000,000	4	1,230,000,000

Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Izin Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	rumah sakit	14	132,740,000	16	662,740,000
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya (Dinas Kesehatan Kota Samarinda)	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	Unit	13	50,000,000	13	260,000,000
Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	unit	0	-	15	320,000,000

Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan (Dinas Kesehatan Kota Samarinda)	Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	Unit	13	57,740,000	13	82,740,000
Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan (Dinas Kesehatan Kota Samarinda)	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	Unit	10	25,000,000	5	-
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase peningkatan kompetensi tenaga kesehatan	persentase	40	2,273,645,000	60	5,413,645,000
Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Perizinan praktek yang dikeluarkan	Orang	3000	100,000,000	3000	1,150,000,000

Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan (Dinas Kesehatan Kota Samarinda)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Dokumen	3000	50,000,000	4	600,000,000
Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan (Dinas Kesehatan Kota Samarinda)	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Dokumen	3000	50,000,000	4	550,000,000
Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Praktek Tenaga Kesehatan DI wilayah Kesehatan Kota Samarinda	Orang	776	674,550,000	777	1,914,550,000

Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Dinas Kesehatan Kota Samarinda)	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dokumen	29	50,000,000	4	220,000,000
Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar (Dinas Kesehatan Kota Samarinda)	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Orang	717	400,000,000	717	220,000,000
Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Dinas Kesehatan Kota Samarinda)	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dokumen	30	224,550,000	4	1,474,550,000
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebutuhan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan yang Kompeten untuk UKP dan UKM	Orang	200	1,499,095,000	250	2,349,095,000

Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Dinas Kesehatan Kota Samarinda)	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	Orang	250	1,499,095,000	250	2,349,095,000
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Tersedianya Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan yang terjamin aman, berkhasiat dan bermutu serta terjamin ketersediaan dan keterjangkauannya	persentase	100	497,716,000	100	917,716,000
	Persentase Rekomendasi yang diberikan pada seluruh sarana Tempat Pengolahan Pangan (TPP)	persentase	25.36		25.38	

Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Izin yang dikeluarkan	sertifikat	50	86,148,000	50	286,148,000
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) (Dinas Kesehatan Kota Samarinda)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Dokumen	50	86,148,000	4	286,148,000

Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Rumah Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Unit	150	230,450,000	500	280,450,000
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga (Dinas Kesehatan Kota Samarinda)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Dokumen	150	230,450,000	500	280,450,000

Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Sarana TPM (RM/Restoran, Jasaboga, Depot Air Minum(DAM) yang diawasi, mendapat Sertifikat Penjamah Makanan dan Laik Higiene dan Sanitasi	unit	0	-	30	50,000,000
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Dokumen	0	-	30	50,000,000
Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Jumlah tempat Makanan Jajanan (PKL/Pasar Ramadhan) dan Sentra Makanan Jajanan yang diawasi dan mendapat Sticker Pembinaan serta mendapat Sertifikat Penjamah Makanan	unit	0	-	100	50,000,000

Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Dokumen	0	-	100	50,000,000
Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Jumlah PIRT yang diperiksa dan Diawasi	Unit	150	181,118,000	200	251,118,000
Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan (Dinas Kesehatan Kota Samarinda)	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan <i>Post Market</i> dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	Unit	150	181,118,000	200	251,118,000

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Murunnya Angka Kesakitan Penyakit Tidak Menular	persentase	11	1,194,378,000	10.5	1,141,200,000
Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan	laporan	1	151,450,000	1	171,450,000
Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat (Dinas Kesehatan Kota Samarinda)	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Dokumen	1	151,450,000	1	171,450,000
Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan Hidup Bersih dan sehat	kegiatan	19	303,178,000	21	365,000,000

Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat (Dinas Kesehatan Kota Samarinda)	Jumlah penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan Hidup Bersih dan sehat	kegiatan	19	250,080,000	21	215,000,000
Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Dinas Kesehatan Kota Samarinda)	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Sersih dan Sehat	keluarga	100	53,098,000	100	150,000,000
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bimbingan Teknis, Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Sehat	bimtek	2	739,750,000	3	604,750,000

Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dinas Kesehatan Kota Samarinda)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dokumen	2	739,750,000	3	604,750,000
---	--	---------	---	-------------	---	-------------



BAB IV



BAB IV.

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam mewujudkan visi dan misinya Dinas Kesehatan Kota Samarinda telah menyusun program – program yang diperkuat dengan kegiatan – kegiatan yang tentunya selaras dengan sasaran strategis dan arah kebijakan yang telah disusun untuk 5 tahun ke depan. Berbagai kegiatan yang telah dirumuskan dari program yang ada tersebut dapat dilihat pada. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah sebagai berikut

Tabel 5
Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2024
Dinas Kesehatan Kota Samarinda

Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	SATUAN	TARGET	Jumlah
Dinas Kesehatan Kota Samarinda									
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				Rp 528.295.308.240
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rasio Puskesmas terhadap jumlah penduduk	Rasio	0,55	Rp 481.585.434.527
						Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Terhadap jumlah penduduk	Rasio	0,58	Rp 46.709.873.713

1	02	02	2,01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				
1	02	02	2,01	0001	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	Unit	2	4.765.000.000
1	02	02	2,01	0002	Pembangunan Puskesmas	Jumlah gedung Puskesmas yang dibangun	unit	1	45.065.597.327
1	02	02	2,01	0003	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	unit	1	8.000.000.000
1	02	02	2,01	0004	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun	unit	1	100.000.000
1	02	02	2,01	0006	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	unit	26	6.640.000.000
1	02	02	2,01	0007	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat	unit	3	2.060.000.000

						Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar			
1	02	02	2,01	0008	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	unit	1	2.100.000.000
1	02	02	2,01	0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	unit	69	5.000.000.000
1	02	02	2,01	0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	unit	3	1.000.000.000
1	02	02	2,01	0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	unit	26	10.052.485.000

1	02	02	2,01	0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	unit	260	160.000.000
1	02	02	2,01	0022	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	unit	1	25.500.000.000
1	02	02	2,01	0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	paket	26	14.864.535.500

1	02	02	2,01	0024	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	paket	59	100.000.000
1	02	02	2,02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	jiwa	975845	
1	02	02	2,02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	19702	2.526.961.120
1	02	02	2,02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	18804	356.000.000
1	02	02	2,02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	17911	350.000.000
1	02	02	2,02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	50557	466.000.000
1	02	02	2,02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan	Orang	152643	1.155.032.500

						Kesehatan Sesuai Standar			
1	02	02	2,02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	860004	1.015.220.000
1	02	02	2,02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	64360	436.840.000
1	02	02	2,02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	340770	781.533.010
1	02	02	2,02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	35291	1.326.077.858
1	02	02	2,02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Orang	1430	650.000.000

1	02	02	2,02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	10042	2.517.700.000
1	02	02	2,02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	20570	778.000.000
1	02	02	2,02	0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Dokumen	59	100.000.000
1	02	02	2,02	0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	Dokumen	59	100.000.000
1	02	02	2,02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	2675	8.134.752.500
1	02	02	2,02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan	Dokumen	26	267.000.000

						Kesehatan Kerja dan Olahraga			
1	02	02	2,02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	2654	504.580.000
1	02	02	2,02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dokumen	40	2.065.299.826
1	02	02	2,02	0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Dokumen	33	150.000.000
1	02	02	2,02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dokumen	59	1.164.425.000
1	02	02	2,02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Orang	1430	100.000.000
1	02	02	2,02	0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Orang	1430	119.500.000

1	02	02	2,02	0024	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Dokumen	26	100.000.000
1	02	02	2,02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	92301	3.844.776.880
1	02	02	2,02	0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dokumen	38000	53.710.776.000
1	02	02	2,02	0027	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah	orang	138	50.000.000
1	02	02	2,02	0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	Paket	1235	198.500.000
1	02	02	2,02	0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Dokumen	7	500.000.000

1	02	02	2,02	0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Dokumen	12	7.344.873.713
1	02	02	2,02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	4	4.613.629.777
1	02	02	2,02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Dokumen	6	400.000.000
1	02	02	2,02	0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	Unit	59	300.000.000
1	02	02	2,02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	laporan	59	1.200.000.000
1	02	02	2,02	0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Dokumen	59	50.000.000
1	02	02	2,02	0038	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan	Unit	1	6.200.000.000

						Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)			
1	02	02	2,02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	10042 Orang	500.000.000
1	02	02	2,02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	20570	500.000.000
1	02	02	2,02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	Orang	588	500.000.000
1	02	02	2,03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Jumlah Faskes Terintegrasi dalam sistem Informasi Kesehatan	Faskes	34	
1	02	02	2,03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Faskes	34	1.230.000.000
1	02	02	2,04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Izin Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	19Rumah Sakit	17 Rumah Sakit	

1	02	02	2,04	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	unit	13	260.000.000
1	02	02	2,04	0002	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	unit	13	320.000.000
1	02	02	2,04	0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	unit	13	82.740.000
1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase peningkatan kompetensi tenaga kesehatan	%	50	
1	02	03	2,01		Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Perizinan praktek yang dikeluarkan	Sertifikat	3000	
1	02	03	2,01	0001	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Sertifikat	3000	600.000.000

1	02	03	2,01	0002	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Sertifikat	3000	550.000.000
1	02	03	2,02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota				
1	02	03	2,02	0001	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Kebutuhan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan yang Kompeten untuk UKP dan UKM	Orang	777	220.000.000
1	02	03	2,02	0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dokumen	1040	220.000.000
1	02	03	2,02	0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dokumen	250	1.474.550.000
1	02	03	2,03		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia	orang	250	

						Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
1	02	03	2,03	0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	orang	250	2.349.095.000
1	02	04			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Tersedianya Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan yang terjamin aman, berkhasiat dan bermutu serta terjamin ketersediaan dan keterjangkauannya Persentase Rekomendasi yang diberikan pada seluruh sarana Tempat Pengolahan Pangan (TPP)	100% 25,46%	100 % 20,69 %	
1	02	04	2,01		Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Izin yang dikeluarkan	Sertifika	50	

1	02	04	2,01	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Dokumen	50	286.148.000
1	02	04	2,03		Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga				
1	02	04	2,03	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Dokumen	1500	280.450.000

1	02	04	2,04		Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)				
1	02	04	2,04	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Sarana TPM (RM/Restoran, Jasaboga, Depot Air Minum(DAM) yang diawasi, mendapat Sertifikat Penjamah Makanan dan Laik Higiene dan Sanitasi	Unit	650	50.000.000
1	02	04	2,05		Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan				
1	02	04	2,05	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Jumlah tempat Makanan Jajanan (PKL/Pasar Ramadhan) dan Sentra Makanan Jajanan yang diawasi dan mendapat Sticker Pembinaan serta mendapat Sertifikat Penjamah Makanan	Unit	150	50.000.000
1	02	04	2,06		Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Jumlah PIRT yang diperiksa dan Diawasi	Unit	200	

1	02	04	2,06	0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	Unit	250	251.118.000
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Menurunnya Angka Kesakitan Penyakit Tidak Menular	10,5 %		
1	02	05	2,01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan	Dokumen	4	
1	02	05	2,01	0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Dokumen	1	171.450.000
1	02	05	2,02		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan Hidup Bersih dan sehat	kegiatan	25	
1	02	05	2,02	0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Dokumen	21	215.000.000

1	02	05	2,02	0002	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Sersih dan Sehat	Keluarga	100	150.000.000
1	02	05	2,03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bimbingan Teknis, Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Sehat	Bimtek	3	
1	02	05	2,03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dokumen	3	604.750.000
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM	82.30 Nilai		
1	02	01	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP	7.6Nilai		
1	02	01	2,01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	7	100.000.000

1	02	01	2,01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	laporan	3	50.000.000
1	02	01	2,01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	laporan	4	50.000.000
1	02	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan	laporan	7	
1	02	01	2,02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	1057	156.362.541.841
1	02	01	2,02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	876	21.144.967.000
1	02	01	2,02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	laporan	5	50.000.000
1	02	01	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai	Orang	1945	
1	02	01	2,05	0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit	10	16.974.400

1	02	01	2,05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	1945	15.913.500
1	02	01	2,05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	1945	15.913.500
1	02	01	2,05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	1075	15.913.500
1	02	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan	Laporan	8	
1	02	01	2,06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	2	5.998.000
1	02	01	2,06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	2	100.000.000
1	02	01	2,06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	20	108.500.000
1	02	01	2,06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	30	50.000.000
1	02	01	2,06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan	Paket	50	50.799.950

						Penggandaan yang Disediakan			
1	02	01	2,06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	2	16.050.000
1	02	01	2,06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	laporan	1000	92.000.000
1	02	01	2,06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	37	198.600.000
1	02	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan rencana kebutuhan barang	laporan	157	
1	02	01	2,08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	12	4.949.417.888
1	02	01	2,08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	laporan	2	110.579.900
1	02	01	2,08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	4	1.000.000.000

1	02	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Pemeliharaan	Laporan	5	
1	02	01	2,09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	unit	345	Rp 44.975.000
1	02	01	2,09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	345	149.848.750
1	02	01	2,09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	345	234.358.000
1	02	01	2,09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	30	191.560.000
1	02	01	2,10		Peningkatan Pelayanan BLUD				
1	02	01	2,10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Dokumen	4	3.200.000.000

UPT Puskesmas Air Putih

1	02	02	2,02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	4	100.000.000
1	02	01	2,10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Dokumen	4	1.500.000.000
UPT Puskesmas Bengkuring									
1	02	02	2,02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	4	100.000.000
1	02	01	2,10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Dokumen	4	500.000.000
UPT Puskesmas Harapan Baru									
1	02	02	2,02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	4	100.000.000
1	02	01	2,10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Dokumen	4	500.000.000
UPT Puskesmas Juanda									
1	02	02	2,02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	4	100.000.000
1	02	01	2,10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan	Dokumen	4	500.000.000

						dan Penunjang Pelayanan			
UPT Puskesmas Kampung Baqa									
1	02	02	2,02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	4	100.000.000
1	02	01	2,10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Dokumen	4	2.100.000.000
UPT Puskesmas Lempake									
1	02	02	2,02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	4	100.000.000
1	02	01	2,10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Dokumen	4	2.300.000.000
UPT Puskesmas Loa Bakung									
1	02	02	2,02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	4	170.000.000
UPT Puskesmas Mangkupalas									
1	02	02	2,02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	4	170.000.000
UPT Puskesmas Palaran									

1	02	02	2,02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	4	100.000.000
1	02	01	2,10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Dokumen	4	2.300.000.000
UPT Puskesmas Pasundan									
1	02	02	2,02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	4	170.000.000
UPT Puskesmas Remaja									
1	02	02	2,02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	4	170.000.000
UPT Puskesmas Sambutan									
1	02	02	2,02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			170.000.000
UPT Puskesmas Segiri									
1	02	02	2,02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	4	100.000.000
1	02	01	2,10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Dokumen	4	3.000.000.000
UPT Puskesmas Sungai Kapih									

1	02	02	2,02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	4	170.000.000
UPT Puskesmas Sungai Siring									
1	02	02	2,02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	4	100.000.000
1	02	01	2,10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Dokumen	4	1.150.000.000
UPT Puskesmas Sempaja									
1	02	02	2,02	0033	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	4	170.000.000
UPT Puskesmas Sidomulyo									
1	02	02	2,02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	4	100.000.000
1	02	01	2,10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Dokumen	4	1.000.000.000
UPT Puskesmas Temindung									
1	02	02	2,02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	4	170.000.000
1	02	01	2,10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan	Dokumen	4	

						dan Penunjang Pelayanan			
UPT Puskesmas Wonorejo									
1	02	02	2,02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	4	100.000.000
1	02	01	2,10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Dokumen	4	1.400.000.000
UPT Puskesmas Trauma Center									
1	02	02	2,02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	4	100.000.000
1	02	01	2,10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Dokumen	4	4.200.000.000
UPT Puskesmas Makroman									
1	02	02	2,02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	4	100.000.000
1	02	01	2,10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Dokumen	4	500.000.000
UPT Puskesmas Bantuas									

1	02	02	2,02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	4	100.000.000
1	02	01	2,10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Dokumen	4	500.000.000
UPT Puskesmas Bukuan									
1	02	02	2,02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	4	100.000.000
1	02	01	2,10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Dokumen	4	500.000.000
UPT Puskesmas Lok Bahu									
1	02	02	2,02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	4	100.000.000
1	02	01	2,10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Dokumen	4	500.000.000
UPT Puskesmas Samarinda Kota									
1	02	02	2,02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	4	100.000.000
1	02	01	2,10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan	Dokumen	4	600.000.000

						dan Penunjang Pelayanan			
UPT Karang Asam									
1	02	02	2,02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	4	100.000.000
1	02	01	2,10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Dokumen	4	750.000.000
RSUD IA. MOEIS									
1	02	01	2,10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Dokumen	4	70.000.000.000
UPT Instalasi Farmasi									
1	02	02	2,01	0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	paket	29	160.000.000
Labkesda Kota Samarinda									
1	02	01	2,10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan			3.000.000.000



BAB V



BAB V

P E N U T U P

Demikian Renja Dinas Kesehatan Kota Samarinda disusun untuk menjadi acuan dan referensi. Hal ini dapat diaplikasikan dalam pemecahan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan kesehatan.

Renja Dinas Kesehatan Kota Samarinda selain menjadi acuan pelaksanaan kegiatan Tahun 2023 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Dinas Kesehatan. Selain sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2023, Renja juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Dinas Kesehatan Kota Samarinda.

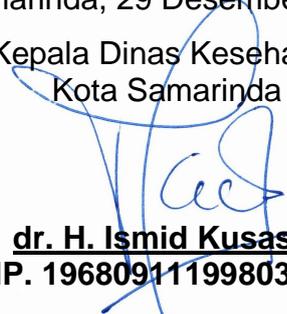
Pelaksanaan Pembangunan Daerah terutama dalam bidang kesehatan diarahkan untuk mencapai target sasaran sesuai dengan program/kegiatan di masing-masing bidang, mengarah pada pencapaian tersebut dan untuk menjamin pelaksanaan program/kegiatan tersebut sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, maka harus dilakukan evaluasi dan analisis sebagai tahapan dalam melakukan pengendalian.

Kerja keras, semangat, komitmen, partisipasi, konsistensi dan disiplin yang tinggi dari pelaksanaan dan pemangku kepentingan sangat diperlukan dalam pelaksanaan Renja sehingga masing-masing dapat bertanggungjawab terhadap proses, hasil dan kinerja pembangunan kesehatan sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing.

Renja juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Dinas Kesehatan Kota Samarinda sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.

Samarinda, 29 Desember 2023

Kepala Dinas Kesehatan
Kota Samarinda



dr. H. Ismid Kusasih
NIP. 196809111998031009